

2021



Analisis Sosial Ekonomi

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

ANALISIS SOSIAL EKONOMI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021

No. Katalog :

No. ISBN :

No. Publikasi :

Ukuran Buku : 15 cm x 21 cm

Jumlah Halaman : xxiv+158

Naskah :

Diterbitkan Oleh :

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
(BAPPELITBANGDA KAB. HSS)**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas kehendak dan bimbinganNya publikasi Analisis Sosial Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 dapat diterbitkan. Publikasi ini menyajikan beberapa indikator yang menggambarkan keadaan sosial ekonomi rumah tangga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Publikasi ini hanya mencakup aspek-aspek yang dapat diukur dan tersedianya data. Informasi umum tentang analisis sosial ekonomi yang tercakup dalam tulisan ini antara lain kependudukan, fertilitas, keluarga Berencana, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi, kemiskinan, perumahan, teknologi informasi dan komunikasi.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Publikasi Analisis Sosial Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021. Semoga Publikasi ini bermanfaat dan dapat menjadi dasar pijakan untuk Kebijakan dalam Peningkatan Kesejahteraan Penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, Juli 2022
Bappelitbangda
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kepala,

M. Arliyan Syahril, M.Pd
NIP. 19700423 199303 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	xi
Bab I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup dan Tujuan	4
1.3 Sumber Data	5
1.4 Sistematika Penyajian	5
Bab II. Kependudukan Dan Fertilitas.....	7
2.1 Persebaran Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin.....	10
2.2 Angka Beban Ketergantungan	16
2.3 Data Kependudukan (Angka Kelahiran dan NIK)	17
2.4 Fertilitas dan Keluarga Berencana	22
Bab III. Kesehatan	35
3.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk	37
3.2 Cara Pengobatan, Fasilitas Kesehatan dan Kebiasaan Merokok.....	39
3.3 Penolong Proses Persalinan dan Air Susu Ibu	55
3.4 Umur Harapan Hidup.....	72

Bab IV. Pendidikan	75
4.1 Angka Melek Huruf.....	77
4.2 Rata-Rata Lama Sekolah	79
4.3 Tingkat Pendidikan	81
4.4 Tingkat Partisipasi Sekolah	82
Bab V. Ketenagakerjaan	87
5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka.....	88
5.2 Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan, Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan.....	96
5.3 Jumlah Jam Kerja.....	103
Bab VI. Pola Konsumsi Dan Kemiskinan.....	107
6.1. Pola Konsumsi.....	107
6.2. Kemiskinan.....	114
6.3. Distribusi Pendapatan.....	122
Bab VII. Perumahan dan TIK.....	127
7.1 Status Kepemilikan Rumah Tinggal	129
7.2 Kondisi Fisik Tempat Tinggal.....	130
7.3 Fasilitas Rumah Tinggal.....	135
7.4 Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	144
Bab VIII. Kesimpulan.....	157

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kepadatan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan Menurut Kecamatan Tahun 2021	11
Tabel 2.2	Penduduk Menurut Kecamatan dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021.....	13
Tabel 2.3	Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021.....	15
Tabel 2.4	Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021.....	16
Tabel 2.5	Persentase Penduduk yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2021	22
Tabel 3.1	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2021.....	40
Tabel 3.2	Persentase Penduduk yang Memiliki Jamina Kesehatan menurut Jenis Kelamin dan Jenis Jaminan	

Kesehatan yang Dimiliki di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	50
Tabel 3.3 Persentase Baduta (Umur 0-23 Bulan) yang pernah diberi ASI di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2021.....	62
Tabel 3.4 Pemberian Imunisasi Secara Lengkap dan Tepat Waktu	66
Tabel 4.1 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2021	78
Tabel 4.2 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021.....	81
Tabel 4.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Non Formal Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2021.....	84
Tabel 4.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Non Formal Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2021.....	85
Tabel 5.1 Distribusi Persentase Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	91

Tabel 5.2	Persentase Pengangguran, Setengah Pengangguran, Pekerja Paruh Waktu dan Pekerja Penuh Waktu Terhadap Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021.....	105
Tabel 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2021.....	109
Tabel 6.2	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita / Bulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2021	111
Tabel 6.3	Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2021	113
Tabel 6.4	Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Komoditi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021.....	104
Tabel 7.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2021.....	129
Tabel 7.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Luas Lantai Per Rumah Tangga dan Daerah Tempat	

Tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2021.....	131
Tabel 7.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Perkapita (Kriteria Rumah Sehat) dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2021.....	133
Tabel 7.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Indikator Kualitas Perumahan dan Daerah Tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2021	135
Tabel 7.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021.....	138

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Persebaran Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Menurut Kecamatan Tahun 2021.....	12
Grafik 2.2	Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	20
Grafik 2.3	Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020	20
Grafik 2.4	Persentase Penduduk Wanita Usia 10 Tahun Ke atas Menurut Status Perkawinan dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	23
Grafik 2.5	Persentase Penduduk Wanita Usia 10 Tahun Ke atas Menurut Status Perkawinan dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020	24
Grafik 2.6	Persentase Penduduk Wanita Usia 10 Tahun Ke atas yang Pernah Kawin Menurut Kelompok Usia Perkawinan Pertama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	27

Grafik 2.7	Persentase Penduduk Wanita Usia 10 Tahun Ke atas yang Pernah Kawin Menurut Kelompok Usia Perkawinan Pertama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020	27
Grafik 2.8	Persentase Penduduk Wanita Usia 10-54 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Usia Pada Saat Hamil Pertama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	28
Grafik 2.9	Persentase Penduduk Wanita Usia 10-54 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Usia Pada Saat Hamil Pertama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020	29
Grafik 2.10.	Persentase Penduduk Perempuan Usia 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Umur Melahirkan Anak Lahir Hidup Pertama Kalinya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	30
Grafik 2.11.	Persentase Penduduk Usia 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Usia Melahirkan Anak Lahir Hidup Pertama Kalinya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020	30
Grafik 2.12.	Persentase Penduduk Wanita Usia 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Partisipasi Penggunaan Alat/Cara KB di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	32

Grafik 2.13.	Persentase Penduduk Wanita Usia 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Partisipasi Penggunaan Alat/Cara KB di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020	32
Grafik 2.14.	Persentase Penduduk Wanita Usia 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Alat / Cara KB di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	33
Grafik 2.15.	Persentase Penduduk Wanita Usia 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Alat / Cara KB di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020	34
Grafik 3.1	Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2021..	39
Grafik 3.2	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Tidak Berobat Jalan Dalam Sebulan Terakhir Menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	41
Grafik 3.3	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Tidak Berobat Jalan Dalam Sebulan Terakhir Menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020	41

Grafik 3.4	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan selama Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	43
Grafik 3.5	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan selama Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020	44
Grafik 3.6	Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	47
Grafik 3.7	Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020	47
Grafik 3.8	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan selama Sebulan Terakhir Menurut Jaminan Kesehatan yang Digunakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	49
Grafik 3.9	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan selama Sebulan Terakhir Menurut Jaminan Kesehatan yang Digunakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020	49

Grafik 3.10	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke atas yang Merokok Tembakau dalam Sebulan Terakhir dan Kebiasaan Merokok di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	53
Grafik 3.11	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke atas yang Merokok Tembakau dalam Sebulan Terakhir Menurut Jumlah Batang Rokok yang Dihisap Per Minggu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	53
Grafik 3.12	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke atas yang Merokok Tembakau dalam Sebulan Terakhir dan Kebiasaan Merokok di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020	54
Grafik 3.13	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke atas yang Merokok Tembakau dalam Sebulan Terakhir Menurut Jumlah Batang Rokok yang Dihisap Per Minggu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020	54
Grafik 3.14	Persentase Wanita Pernah kawin Usia 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Tempat Melahirkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	57
Grafik 3.15	Persentase Wanita Pernah kawin Usia 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Dalam	

	2 Tahun Terakhir Menurut Tenaga Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	57
Grafik 3.16	Persentase Wanita Pernah kawin Usia 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Berat Badan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Ketika Dilahirkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	60
Grafik 3.17	Persentase Wanita Pernah kawin Usia 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Berat Badan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Ketika Dilahirkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020	60
Grafik 3.18	Rata-Rata Lama Baduta (Umur 0-23 Bulan) diberikan ASI di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2021 (Bulan).....	63
Grafik 3.19	Persentase Baduta (Umur 7-23 Bulan) yang Pernah Diberi ASI Menurut Lamanya Pemberian ASI Tanpa Makanan Pendamping (Bulan) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	64
Grafik 3.20	Persentase Baduta (Umur 7-23 Bulan) yang Pernah Diberi ASI Menurut Lamanya Pemberian ASI Tanpa Makanan Pendamping (Bulan) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020	64

Grafik 3.21	Persentase Anak Usia 0-59 Bulan Selama Pandemi Covid 19 (Maret 2020 s.d Pencacahan Maret 2021) Menurut Perlakuan Pemberian Imunisasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	67
Grafik 3.22	Persentase Anak Usia 0-59 Bulan Menurut Alasan Utama Menunda / Tidak Memberikan Imunisasi Kepada Balita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	67
Grafik 3.23	Persentase Balita Usia 0-59 Bulan yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	68
Grafik 3.24	Persentase Balita Usia 0-59 Bulan yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020	68
Grafik 3.25	Persentase Balita Usia 0-59 Bulan yang Mendapat Imunisasi Lengkap (1-3-3-1-3) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2021	70
Grafik 3.26	Persentase Penduduk Usia 0-59 Bulan yang Mempunyai Kartu Imunisasi KIA/KMS Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	71

Grafik 3.27	Persentase Penduduk Usia 0-59 Bulan yang Mempunyai Kartu Imunisasi KIA/KMS Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020	72
Grafik 3.28	Umur Harapan Hidup di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017- 2021	73
Grafik 4.1	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017- 2021	80
Grafik 5.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2021	89
Grafik 5.2	Persentase Penduduk Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	92
Grafik 5.3	Persentase Penduduk Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020	94
Grafik 5.4	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2021	94
Grafik 5.5	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang Statusnya Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	95

Grafik 5.6	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang Statusnya Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020	95
Grafik 5.7	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	97
Grafik 5.8	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020	97
Grafik 5.9	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	99
Grafik 5.10	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020	99

Grafik 5.11	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	100
Grafik 5.12	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020	101
Grafik 5.13	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Status Formal dan Informal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2021..	102
Grafik 5.14	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Jam Kerja Selama Seminggu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2021..	104
Grafik 6.1	Garis Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2021	118
Grafik 6.2	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2021	120
Grafik 6.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2021	120
Grafik 6.4	Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2021	121
Grafik 6.5	Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2021	125

Grafik 7.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Bahan Bakar Memasak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	141
Grafik 7.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Bahan Bakar Memasak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020	142
Grafik 7.3	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Mengusai/ Memiliki Telepon Seluler (HP) Dalam Tiga Bulan Terakhir di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2021	146
Grafik 7.4	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP) Dalam Tiga Bulan Terakhir di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2021	146
Grafik 7.5	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Menguasai/ Memiliki Telepon Seluler (HP) Dalam Tiga Bulan Terakhir Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	148
Grafik 7.6	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP) Dalam Tiga Bulan Terakhir Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	148

Grafik 7.7	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Menggunakan Komputer (PC/Laptop/Notebook/ Tablet) Dalam Tiga Bulan Terakhir Menurut Klasifikasi Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2021	149
Grafik 7.8	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Menggunakan Komputer Dalam Tiga Bulan Terakhir Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	150
Grafik 7.9	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Menggunakan Komputer Dalam Tiga Bulan Terakhir Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020	151
Grafik 7.10	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet Dalam Tiga Bulan Terakhir Menurut Klasifikasi Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2021	153
Grafik 7.11	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet Dalam Tiga Bulan Terakhir Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	153

Grafik 7.12	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet Dalam Tiga Bulan Terakhir Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020	153
Grafik 7.13	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet Dalam Tiga Bulan Terakhir Menurut Media yang Digunakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2021	155
Grafik 7.14	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet Dalam Tiga Bulan Terakhir Menurut Tujuan Penggunaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2021	156

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya istilah pembangunan ekonomi menggambarkan perubahan dalam ekonomi suatu negara yang melibatkan perbaikan kualitatif maupun kuantitatif. Dikutip dari buku Pusaran Pembangunan Ekonomi (2019) oleh Rustan, pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita. Pembangunan ekonomi dihitung dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dijabarkan dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diyakini akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan naiknya angka Produk Domestik Bruto (PDB) riil perkapita. Tetapi pada

kenyataannya, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat mengatasi masalah sosial ekonomi seperti pengangguran, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Berpijak dari hal tersebut, konsep pembangunan ekonomi perlu didefinisikan kembali (*redefined*). Tujuan pembangunan ekonomi bukan lagi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya, melainkan bertujuan menghapus atau mengurangi penduduk miskin, menanggulangi ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja (Todaro 2000).

Sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi yang telah *redefined* tersebut, pemerintah harus berusaha untuk meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat dengan menetapkan kebijakan-kebijakan di bidang sosial dan ekonomi yang bersentuhan dengan masyarakat. Wujud realisasi dari kebijakan tersebut diantaranya Program Wajib Belajar 9 Tahun, Program KB, intervensi/ perlindungan daya beli masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin melalui program bantuan dan perlindungan sosial: Program Keluarga Harapan (PKH), Raskin, Bantuan Siswa Miskin (BSM), BPJS Kesehatan PBI, Bantuan pangan (Bantuan Pangan Non Tunai / Program Sembako), bantuan untuk penyandang cacat dan lansia, program pemberdayaan masyarakat melalui PNPM

Mandiri, dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Program-program yang diyakini sangat pro rakyat tersebut diharapkan dapat melindungi kinerja perekonomian untuk tetap mampu menyediakan kesempatan kerja, meningkatkan kualitas SDM, dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan itu diperlukan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan. Salah satu informasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan adalah indikator sosial ekonomi yang diharapkan dapat menggambarkan fenomena sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat, terutama yang berhubungan dengan taraf hidup, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Indikator tersebut dapat menjadi sumber petunjuk sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan memberikan hasil bagi masyarakat dan dapat mengetahui indikator yang belum memberikan hasil optimal sehingga dapat dijadikan salah satu fokus pembangunan selanjutnya.

1.2 Ruang Lingkup dan Tujuan

Analisis Sosial Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini mencakup semua bidang sosial ekonomi antara lain: Kependudukan dan Fertilitas, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Pola konsumsi dan Kemiskinan, Perumahan dan Teknologi Informasi & Komunikasi pada tahun 2021. Penerbitan Analisis Sosial Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang tingkat keberhasilan pembangunan yang ditunjukkan dengan tercapainya tujuan pembangunan. Dari gambaran tersebut diharapkan diperoleh hal-hal yang bermanfaat guna mengantisipasi berbagai kendala atau hambatan sehingga dapat disusun perencanaan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Indikator ini juga sangat penting bagi para perencana pembangunan dan pengambil kebijakan daerah untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan telah dicapai. Apalagi sejak pelaksanaan otonomi daerah tahun 2000, dimana kabupaten/kota memiliki kebijakan dan kewenangan yang lebih besar untuk menjalankan roda pembangunan, sehingga

daerah mempunyai peran sangat penting dalam menyiapkan dan meningkatkan sumber daya yang dimilikinya. Dengan demikian diharapkan indikator-indikator sosial ekonomi pada publikasi ini bisa menjadi salah satu bahan dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah ke depannya.

1.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk materi agregat dan komposisi penduduk diperoleh dari proyeksi penduduk interim 2021-2023;
2. Untuk materi kesehatan, fertilitas, KB, pendidikan, perumahan, pola konsumsi, kemiskinan dan teknologi informasi dan komunikasi diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2020-2021;
3. Untuk materi ketenagakerjaan diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2017-2021

1.4 Sistematika Penyajian

Publikasi Analisis Sosial Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 ini disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan
- Bab II. Kependudukan dan Fertilitas
- Bab III. Kesehatan
- Bab IV. Pendidikan
- Bab V. Ketenagakerjaan
- Bab VI. Pola Konsumsi dan Kemiskinan
- Bab VII. Perumahan dan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)

BAB II

KEPENDUDUKAN DAN FERTILITAS

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun. Penduduk berperan sebagai subjek dan objek dari pembangunan itu sendiri, maka penduduk harus dibina dan dikembangkan agar mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya sebagai objek pembangunan, penduduk harus dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dan menerima segala konsekuensi dari pelaksanaan pembangunan tersebut.

Kuantitas penduduk yang besar dapat menjadi modal dasar pembangunan jika ditunjang dengan kualitas sumber daya manusia yang baik. Namun sebaliknya jumlah penduduk yang besar juga menyimpan potensi untuk menjadi beban dalam proses pembangunan apabila sumber daya manusianya tersebut berkualitas rendah. Untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas tersebut harus dimulai dengan perencanaan pembangunan kependudukan yang berkualitas. Dengan kata lain perencanaan harus didasarkan

pada fakta dan data kependudukan yang akurat. Berdasarkan data kependudukan tersebut, pemerintah maupun pihak lain seperti dunia usaha dapat menyusun berbagai perencanaan, penentuan kebijakan, dan evaluasi hasil pembangunan. Dengan demikian, semakin lengkap dan akurat data kependudukan yang tersedia maka perencanaannya akan makin mudah dan tepat.

Saat ini konsentrasi data kependudukan tersebut tidak hanya terbatas pada penyediaan data kuantitas dan dinamika penduduk, tetapi data kependudukan juga digunakan untuk melihat fenomena sosial masyarakat yang semakin berkembang. Untuk itu gambaran mengenai kualitas penduduk sebagai sumber daya manusia agar menjadi kekuatan dalam pembangunan, juga sangat dibutuhkan. Gambaran tersebut meliputi pencapaian pembangunan pada komponen-komponen sosial yang berpengaruh pada kualitas penduduk seperti bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan perumahan.

Kondisi penduduk suatu daerah tentu akan sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan dan menekan seminimal mungkin efek negatif

dari pembangunan, diperlukan pemahaman tentang karakteristik penduduk di suatu daerah. Artinya dalam penyusunan perencanaan pembangunan di suatu daerah, harus didasarkan pada kondisi penduduk. Perencanaan pembangunan yang meniadakan variabel penduduk disebut kebijakan yang tidak sempurna, dan kebijakan kependudukan yang tidak dikaitkan dengan pembangunan adalah tidak bermakna. Peranan penduduk selama pelaksanaan pembangunan tidak boleh diabaikan karena dinamika kependudukan yang kompleks, dampaknya baru akan terasa dalam jangka panjang.

Perkembangan penduduk di suatu daerah dipengaruhi oleh keterkaitan antara variabel demografi dan non-demografi, sehingga setiap daerah memiliki potensi dan keunikan karakteristik penduduk masing-masing. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis yang berbeda serta suku dan adat istiadat yang beraneka ragam. Potensi dan keunikan karakteristik penduduk di suatu daerah merupakan salah satu hal yang diangkat dalam kerangka otonomi daerah. Potensi dan keunikan tersebut harus tetap menjadi fokus kebijakan kependudukan di masing-masing daerah, karena berbagai perbedaan tersebut pada akhirnya membutuhkan kebijakan kependudukan yang bisa berbeda dengan daerah lain. Dalam

pelaksanaan otonomi, pemerintah daerah diberi hak otonom untuk menetapkan kebijakan kependudukan yang diselaraskan dengan kebijakan kependudukan nasional.

2.1 Persebaran Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin

Berdasarkan perhitungan Proyeksi Penduduk Interim 2021-2023 diperoleh jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 berjumlah sekitar 230 ribu jiwa. Adanya kelahiran dan adanya migrasi masuk dari daerah lain merupakan faktor penambah penduduk. Perpindahan penduduk biasanya mengalir dari daerah perdesaan ke perkotaan yang dikenal dengan urbanisasi. Daerah yang tingkat kepadatan tertinggi akan dihadapkan pada permasalahan kebutuhan akan perumahan, kesehatan, dan keamanan. Selain itu juga harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan sarana pendidikan yang terjangkau bagi penduduknya.

Di sisi lain, daerah yang padat biasanya lebih cepat berkembang dalam hal perekonomian di banding daerah yang jarang penduduknya, karena itu perlu upaya menciptakan pembangunan merata di setiap daerah disertai

penciptaan lapangan kerja, dengan tidak melupakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Tabel 2.1. Kepadatan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan Menurut Kecamatan Tahun 2021

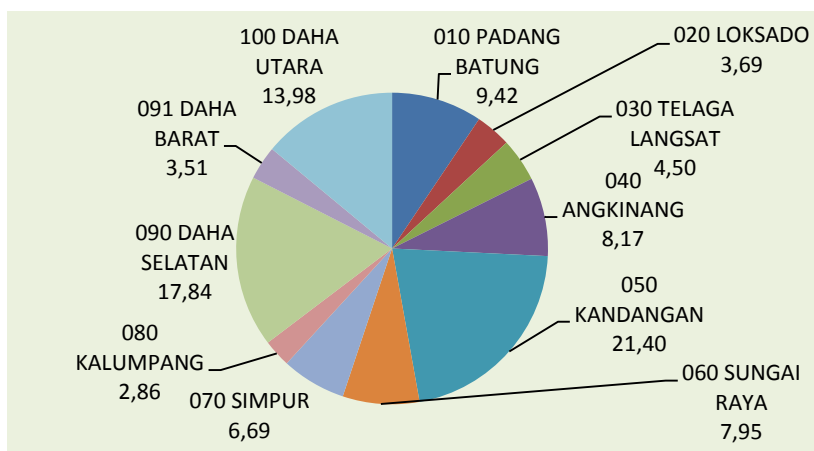
KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH (km ²)	RATA-RATA PENDUDUK PER km ²
(1)	(2)	(3)	(4)
010 Padang Batung	21.656	203,93	106
020 Loksado	8.496	338,89	25
030 Telaga Langsat	10.346	58,08	178
040 Angkinang	18.780	58,40	322
050 Kandangan	49.204	106,71	461
060 Sungai Raya	18.277	80,96	226
070 Simpur	15.385	82,35	187
080 Kalumpang	6.586	135,07	49
090 Daha Selatan	41.014	322,82	127
091 Daha Barat	8.063	149,62	54
100 Daha Utara	32.153	268,11	120
JUMLAH	229.960	1.804,94	127

Sumber: Proyeksi Penduduk Interim 2021-2023, BPS Kab. HSS

Peningkatan jumlah penduduk harus ditangani dengan baik dan komprehensif. Pemerintah daerah melalui SKPD/dinas/instansi terkait perlu melakukan upaya pengendalian jumlah penduduk secara terpadu dan

berkesinambungan dan diiringi oleh peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Gambaran kepadatan penduduk antar kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Grafik 2.1. Persebaran Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan Menurut Kecamatan Tahun 2021 (persen)



Sumber: Proyeksi Penduduk Interim 2021-2023, BPS Kab. HSS

Pada tahun 2021 jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah penduduk Kecamatan Kandangan yang mencapai angka 49.204 jiwa. Sedangkan luas wilayah kecamatan ini sekitar 106,71 km², berarti kepadatan penduduk kecamatan Kandangan mencapai angka 461 jiwa per km². Penduduk terbanyak kedua adalah

kecamatan Daha Selatan yaitu 41.014 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 127 jiwa untuk setiap km². Meskipun jumlah penduduk Kecamatan Daha Selatan terbanyak kedua dari kecamatan lainnya , akan tetapi dari segi kepadatan penduduk kecamatan Daha Selatan berada di urutan ke enam dari kecamatan lainnya.

Tabel 2.2. Penduduk Menurut Kecamatan dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021

KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	RASIO JENIS KELAMIN
(1)	(2)	(3)	(4)
010 PADANG BATUNG	10.756	10.900	98,68
020 LOKSADO	4.306	4.190	102,77
030 TELAGA LANGSAT	5.238	5.108	102,55
040 ANGKINANG	9.335	9.445	98,84
050 KANDANGAN	24.421	24.783	98,54
060 SUNGAI RAYA	9.071	9.206	98,53
070 SIMPUR	7.610	7.775	97,88
080 KALUMPANG	3.346	3.240	103,27
090 DAHA SELATAN	20.786	20.228	102,76
091 DAHA BARAT	4.135	3.928	105,27
100 DAHA UTARA	16.362	15.791	103,62
JUMLAH	115.366	114.594	100,67

Sumber: Proyeksi Penduduk Interim 2021-2023, BPS Kab. HSS

Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Hulu Sungai

Selatan tahun 2021 menunjukkan angka sekitar 100,67. Hal ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 100 sampai 101 penduduk laki-laki atau dengan kata lain jumlah penduduk laki-laki hampir sama dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Terdapat empat kecamatan dengan rasio berada dibawah 100, yaitu kecamatan Padang Batung, Angkinang, Kandangan, Sungai Raya dan Simpur. Sedangkan terdapat 6 kecamatan yang memiliki rasio diatas 100.

Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan mulai dari usia muda sampai menjelang masa produktif didominasi oleh penduduk laki-laki. Hal tersebut terlihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada Tabel 2.4. Pada kelompok umur 0–4 tahun sampai 35–39 tahun, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan diatas angka 100, artinya penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, kecuali pada kelompok kelompok umur 40 ke atas. Rasio jenis kelamin pada penduduk usia 65 tahun ke atas kurang dari 100. Artinya pada kelompok usia tua, penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan didominasi oleh mereka yang berjenis kelamin perempuan sedangkan penduduk usia muda di dominasi

penduduk laki-laki. Keadaan ini mengindikasikan bahwa harapan hidup perempuan lebih panjang dibandingkan penduduk laki-laki.

Tabel 2.3. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021

Kelompok Umur	Laki-Laki/ <i>Male</i>	Perempuan/ <i>Female</i>	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	9.789	9.271	105,59
5-9	10.455	10.046	104,07
10-14	9.682	9.353	103,52
15-19	9.566	9.209	103,88
20-24	9.915	8.961	110,65
25-29	9.487	8.499	111,62
30-34	9.193	8.586	107,07
35-39	8.390	8.183	102,53
40-44	8.185	8.197	99,85
45-49	7.848	8.154	96,25
50-54	7.054	7.265	97,10
55-59	5.778	6.133	94,21
60-64	4.426	4.717	93,83
65-69	2.855	3.431	83,21
70-74	1.573	2.273	69,20
75+	1.170	2.316	50,52
Jumlah	115.366	114.594	100,67

Sumber: Proyeksi Penduduk Interim 2021-2023, BPS Kab. HSS

2.2 Angka Beban Ketergantungan

Ada tiga pengelompokan penduduk berkaitan antara struktur umur dan kemampuan memproduksi secara ekonomi, yaitu, kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) sebesar 25,48 persen, kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebesar 68,60 persen dan kelompok usia tua (65+) sebesar 5,92 persen. Berdasarkan kelompok umur tersebut diperoleh angka besarnya rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang belum/tidak produktif. Pada Tabel 2.4. terlihat Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki rasio ketergantungan penduduk sebesar 45,78 persen yang berarti bahwa dalam setiap 100 penduduk usia produktif, menanggung sekitar 45 sampai 46 orang yang belum/tidak produktif.

Tabel 2.4. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021

KELOMPOK UMUR	JUMLAH PENDUDUK	%	RASIO KETERGANTUNGAN		
			TOTAL	MUDA	TUA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0 - 14	58.596	25,48	45,78	37,15	8,63
15 - 64	157.746	68,60			
65+	13.618	5,92			
JUMLAH	229.960				

Sumber: Proyeksi Penduduk Interim 2021-2023, BPS Kab. HSS

2.3 Data Kependudukan (Akta Kelahiran dan Nomor Induk Kependudukan)

Dokumen Kependudukan merupakan dokumen yang sangat penting bagi masyarakat yang perlu dimiliki oleh setiap orang. Dokumen kependudukan tersebut berupa Akta – Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran , Akta Perkawinan/Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak dan Akta Kematian), Kartu Keluarga, KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan direvisi terakhir menjadi Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen kependudukan merupakan hak dan identitas setiap orang yang digunakan untuk berbagai macam urusan seperti akta kelahiran untuk mengurus kepentingan sekolah dan lain sebagainya.

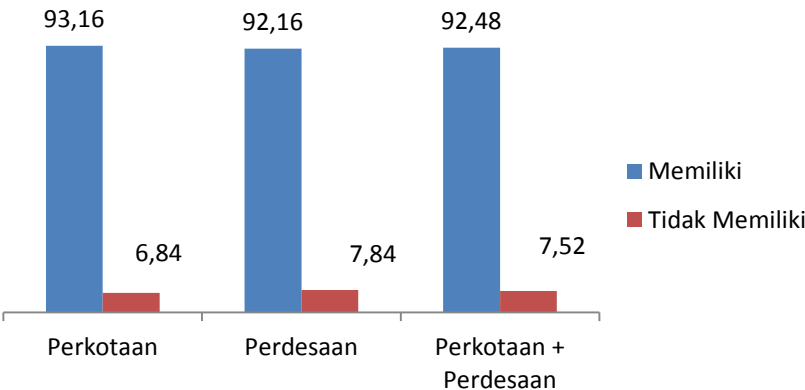
Saat ini kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan masih kurang. Hal itu terlihat dengan masih banyaknya masyarakat yang baru akan mengurus dokumen kependudukan apabila dokumen tersebut diperlukan dalam waktu dekat saat ada keperluan, sebelum memerlukan mereka tidak mengurus dokumen kependudukannya. Saat waktunya diperlukan mereka pun segera mengurusnya dan ingin segera cepat selesai. Oleh karena itu, apabila ada perubahan data kependudukan perlu segera melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. Misalnya ada peristiwa kelahiran serta perubahan-perubahan data kependudukan lainnya seperti perubahan Kartu Keluarga, Perubahan Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap milik mereka.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan 95 persen dari seluruh anak usia 0 hingga 18 tahun, memiliki akta kelahiran pada tahun 2019. Pembangunan Jangka pemerintah memiliki target dalam RPJMN 2020 – 2024 terkait pemenuhan hak sipil anak atas kepemilikan akte kelahiran sebanyak 100 persen dari seluruh

jumlah anak di Indonesia. Adapun, target capaian tahun 2021 berdasarkan RPJMN lima tahunan tersebut sebanyak 95 persen dari jumlah anak. Menurut data dari SUSENAS tahun 2021, persentase penduduk berumur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran sebesar 92,48 persen, berarti di Kabupaten Hulu Sungai Selatan di perkirakan untuk target kepemilikan akta kelahiran penduduk berumur 0-18 tahun masih belum melampaui target Kemendagri. Penduduk berumur 0-17 tahun yang belum memiliki akta kelahiran masih ada sebesar 7,52 persen.

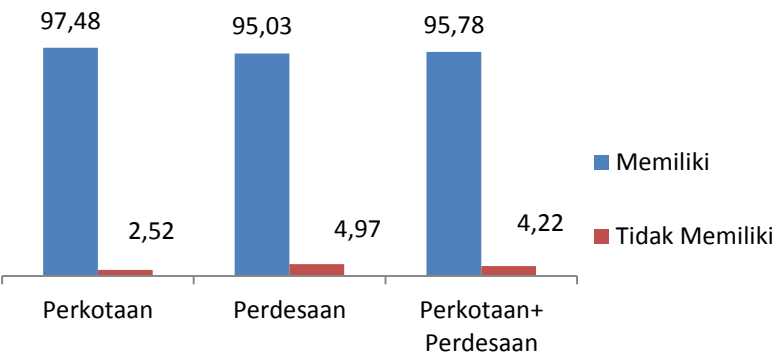
Persentase penduduk perkotaan dan persentase penduduk perdesaan berumur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran tidak berbeda jauh. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki akta kelahiran sudah baik, walaupun persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran terutama penduduk yang berumur 0-17 tahun pada tahun 2021 lebih rendah dibandingkan tahun 2020 dan belum mencapai angka 95 persen. Diharapkan kedepannya persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran terutama penduduk yang berumur 0-18 tahun mencapai 95 persen (target nasional) bahkan 100 persen.

Grafik 2.2 Persentase Penduduk Berumur 0–17 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021



Sumber : Diolah dari Susenas 2021, BPS Kab. HSS

Grafik 2.3 Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020



Sumber : Diolah dari Susenas 2020, BPS Kab. HSS

Sesuai dengan bunyi pasal 1 point 12 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK tersebut berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK pertama kali diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan ketika Institusi Pemerintah ini menerapkan sistem KTP nasional yang terkomputerisasi.

Dokumen Kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan Akta Catatan Sipil sangat dibutuhkan Penduduk di semua strata sosial, karena merupakan awal dan salah satu persyaratan untuk pengurusan pelayanan publik lainnya. Pada dokumen kependudukan tersebut ada tercantum data NIK.

Menurut data SUSENAS 2021, persentase penduduk berumur 5 tahun keatas yang memiliki nomor induk

kependudukan (NIK) sebesar 99,96 persen demikian juga persentase penduduk yang berumur 17 tahun ke atas mencapai 99,97 persen. Angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka tahun 2020. Persentase penduduk yang berumur 5 tahun ke atas dan 17 tahun ke atas menunjukkan angka diatas 99 persen. Dengan demikian hampir semua penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah memiliki NIK.

Tabel 2.5. Persentase Penduduk yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2021

Jenis Kelamin	2020		2021	
	Kelompok Umur			
	5 Tahun ke Atas	17 Tahun ke Atas	5 Tahun ke Atas	17 Tahun ke Atas
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
Laki-laki	99,89	99,86	99,98	99,98
Perempuan	99,85	99,98	99,92	99,95
Laki-laki + Perempuan	99,87	99,93	99,96	99,97

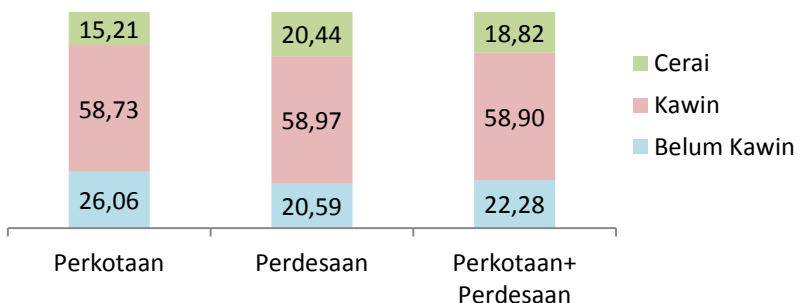
Sumber : Diolah dari Susenas 2020-2021, BPS Kab. HSS

2.4 Fertilitas dan Keluarga Berencana

Fertilitas (kelahiran) merupakan salah satu komponen perubahan jumlah penduduk disamping mortalitas (kematian) dan migrasi (perpindahan). Besarnya kelahiran antara lain

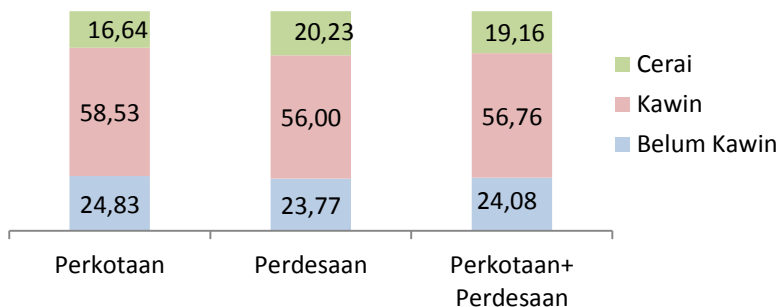
dipengaruhi oleh jumlah wanita berstatus pernah/sedang kawin, usia perkawinan pertama, dan tingkat partisipasi keluarga berencana (KB). Berdasarkan SUSENAS 2021 mencatat persentase wanita Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berstatus kawin sebesar 58,90 persen. Jika di bandingkan data tahun sebelumnya (2020), pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 2,14 persen (2020 = 56,76 persen). Semakin besar persentase wanita berstatus kawin semakin besar peluang untuk punya anak (melahirkan). Pada tahun 2021, peluang penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas di perdesaan dan perkotaan untuk memiliki anak tidak berbeda jauh

Grafik 2.4 Persentase Penduduk Wanita Usia 10 Tahun Ke atas Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Status Perkawinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021



Sumber : Diolah dari Susenas 2021, BPS Kab. HSS

Grafik 2.5 Persentase Penduduk Wanita Usia 10 Tahun Ke atas Menurut Daerah Tempat Tinggal Status Perkawinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020



Sumber : Diolah dari Susenas 2020, BPS Kab. HSS

Peluang untuk memiliki anak juga dapat dilihat dari umur pada saat melangsungkan perkawinan pertama. Semakin muda usia perkawinan pertama, maka semakin lama perempuan memasuki dunia perkawinan, artinya akan semakin panjang masa reproduksi sehingga akan semakin besar peluang untuk memiliki anak. BPS mendefinisikan umur perkawinan pertama sebagai umur pada saat perempuan melakukan hubungan suami-istri pertama kali. Usia perkawinan pertama yang dilakukan oleh setiap wanita memiliki resiko terhadap persalinannya. Semakin muda usia kawin pertama seorang perempuan, semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu dan anak.

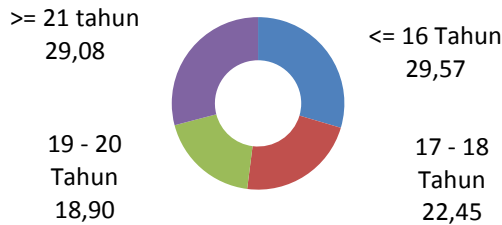
Menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia perkawinan pertama bagi remaja saat ini idealnya 21 hingga 25 tahun. Hal ini menindaklanjuti maraknya terjadinya pernikahan dini. Mengutip buku III BKKBN yang berjudul “Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi Di Indonesia: Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah Tahun 2016” mendefinisikan pernikahan dini mengacu kepada sebuah pernikahan yang berada di bawah batas umur dewasa atau pernikahan yang melibatkan satu atau dua pihak yang masih anak-anak. Secara umum pernikahan disebut pernikahan dini jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia di bawah 18 tahun.

Pada tahun 2020 lalu, telah dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perihal batasan minimal usia pernikahan yang diizinkan untuk laki-laki dan wanita menjadi 19 tahun. Salah satu cara untuk menekan pernikahan dini yaitu dengan menetapkan batasan usia minimum perkawinan. Pernikahan dini banyak membawa dampak buruk seperti rentan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), risiko meninggal karena reproduksi yang belum siap, dan terputusnya akses pendidikan. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, seperti perilaku

seksual dan kehamilan yang tidak dikehendaki, tradisi atau budaya, rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi, tingkat pendidikan orang tua, faktor sosial ekonomi, serta lemahnya penegakan hukum.

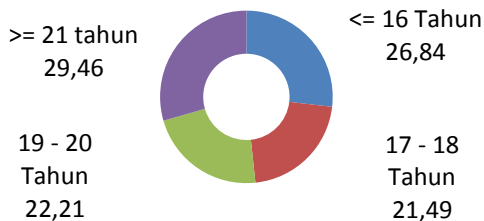
Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, masih cukup banyak wanita yang usia kawin pertamanya kurang dari usia 17 tahun. Pada tahun 2021, wanita berusia 10 tahun ke atas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah melakukan pernikahan pada saat usia kurang dari 17 tahun sebesar 29,57 persen. Jika dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2020) persentase penduduk wanita yang usia kawin pertamanya dibawah 17 tahun mengalami kenaikan. Grafik 2.6 dan Grafik 2.7 menyajikan persentase penduduk wanita usia 10 tahun ke atas yang pernah kawin menurut kelompok usia kawin pertama. Pada Grafik 2.6, pada tahun 2021 menunjukkan sebagian besar wanita melakukan perkawinan pertama pada usia 20 tahun ke bawah sebesar 70,92 persen. Sebaliknya, wanita yang melakukan perkawinan pertama pada usia 21 ke atas tahun hanya 29,08 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai usia ideal untuk melakukan perkawinan pertama usia di atas 20 tahun masih rendah.

Grafik 2.6 Persentase Penduduk Wanita Usia 10 Tahun Ke atas yang Pernah Kawin Menurut Usia Kawin Pertama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021



Sumber : Diolah dari SUSENAS 2021, BPS Kab. HSS

Grafik 2.7 Persentase Penduduk Wanita Usia 10 Tahun Ke atas yang Pernah Kawin Menurut Usia Kawin Pertama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020

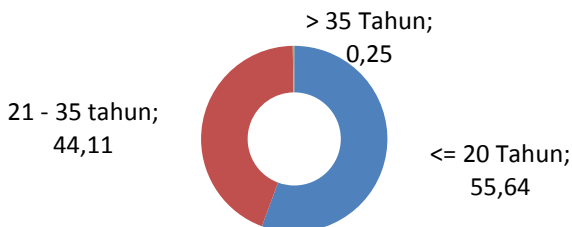


Sumber : Diolah dari SUSENAS 2020, BPS Kab. HSS

Usia yang paling ideal untuk hamil dan melahirkan adalah usia 21-35 tahun jika dilihat perkembangan kematangan, wanita pada kelompok umur ini telah memiliki kematangan reproduksi, emosional maupun aspek sosial. Pada kehamilan di usia muda (termasuk usia remaja di bawah 20

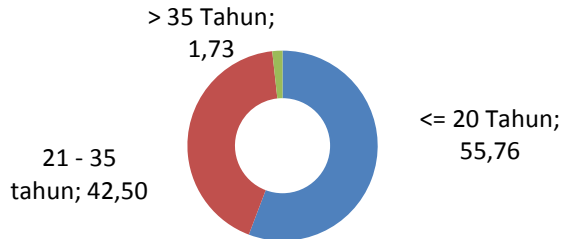
tahun) memiliki resiko yang lebih tinggi pada kesehatan. Pada usia di bawah 20 tahun secara ilmu kedokteran memiliki organ reproduksi yang belum siap dan beresiko tinggi mengalami kondisi kesehatan yang buruk saat hamil. Selain itu kondisi sel telur belum sempurna dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan janin. Beberapa kondisi kesehatan yang mungkin terjadi adalah tekanan darah tinggi pada ibu hamil, kelahiran prematur yaitu kelahiran di bawah 37 minggu. Hal yang paling dikhawatirkan adalah kematian ibu dan bayi yang tinggi dikarenakan terjadinya pendarahan dan infeksi. Selain hamil dan melahirkan pada usia di bawah 20 tahun yang mempunyai resiko yang lebih tinggi pada kesehatan, hamil dan melahirkan pada usia diatas 35 tahun juga beresiko lebih tinggi pada kesehatan.

Grafik 2.8 Persentase Penduduk Wanita Usia 15-49 Tahun yang Pernah Hamil Menurut Usia Saat Hamil Pertama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021



Sumber : Diolah dari Susenas 2021, BPS Kab. HSS

Grafik 2.9 Persentase Penduduk Wanita Usia 15-49 Tahun yang Pernah Hamil Menurut Usia Saat Hamil Pertama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020

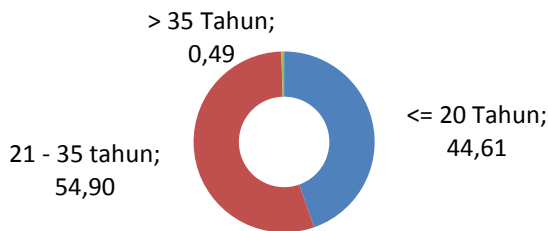


Sumber : Diolah dari Susenas 2020, BPS Kab. HSS

Pada Grafik 2.8. dan Grafik 2.10. menunjukkan bahwa masih banyak wanita usia 15-49 tahun yang pernah kawin hamil pertama kalinya dan melahirkan anak lahir hidup pertama kalinya pada usia 20 tahun ke bawah pada tahun 2021 maupun 2020. Pada tahun 2021, persentase wanita usia 10-49 tahun usia hamil pertama kalinya pada usia 20 tahun kebawah yaitu sebesar 55,76 persen dan persentase wanita usia 15-49 tahun usia pertama kali melahirkan anak lahir hidup pertama kalinya pada usia 20 tahun kebawah yaitu sebesar 44,61 persen. Hal demikian menunjukkan bahwa masih banyak wanita usia 10-49 tahun hamil pertama kalinya dan wanita usia 15-49 tahun melahirkan anak lahir hidup pertama kalinya pada usia yang tidak ideal (usia 20 tahun kebawah dan 35 tahun ke atas), yang mempunyai resiko tinggi pada keselamatan dan

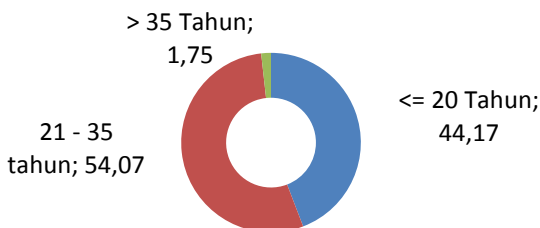
kesehatan ibu dan anak. Diharapkan kedepannya kesadaran ibu untuk hamil pertama kalinya dan melahirkan pertama kalinya pada usia ideal semakin tinggi agar tidak berisiko pada kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi.

Grafik 2.10 Persentase Penduduk Wanita Usia 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Menurut Usia Saat Melahirkan Anak Lahir Hidup Pertama Kalinya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021



Sumber : Diolah dari Susenas 2021, BPS Kab. HSS

Grafik 2.11 Persentase Penduduk Wanita Usia 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan Menurut Usia Saat Melahirkan Anak Lahir Hidup Pertama Kalinya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020



Sumber : Diolah dari Susenas 2020, BPS Kab. HSS

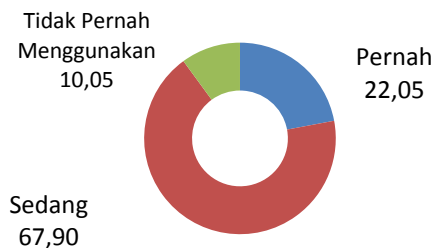
Program KB adalah bagian yang terpadu (integral) dalam program pembangunan nasional dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual dan sosial budaya penduduk Indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional. Keluarga Berencana adalah suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk, maka dari itu program KB ini diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang.

Perlu diketahui, bahwa Gerakan Keluarga Berencana Nasional Indonesia telah dianggap masyarakat dunia sebagai program yang berhasil menurunkan angka kelahiran yang bermakna. Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan yaitu dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya.

Berdasarkan data SUSENAS 2021, persentase wanita pernah kawin usia 15-49 tahun yang sedang menggunakan KB sebesar 67,90 persen dan yang pernah menggunakan KB sebesar 22,05 persen. Jika dibandingkan tahun 2020, wanita

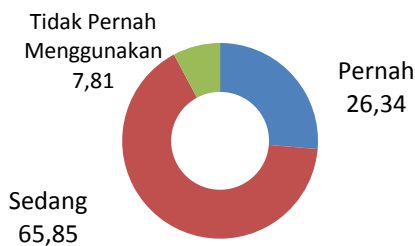
pernah kawin usia 15-49 tahun yang sedang menggunakan KB pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan lebih dari separuh penduduk wanita usia 15-49 tahun sedang menggunakan KB (peserta KB aktif).

Grafik 2.12 Persentase Penduduk Wanita Usia 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Partisipasi Penggunaan Alat/Cara KB di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021



Sumber : Diolah dari Susenas 2021, BPS Kab. HSS

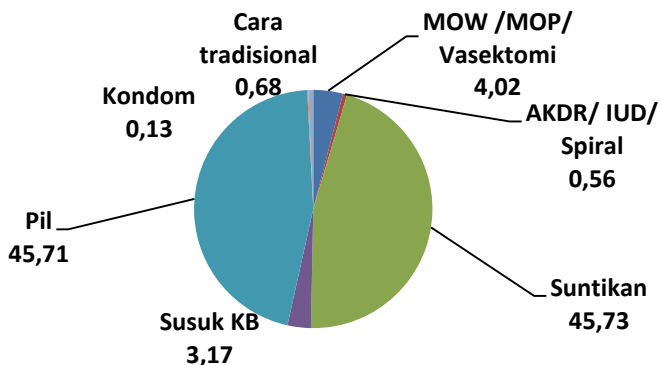
Grafik 2.13 Persentase Penduduk Wanita Usia 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Partisipasi Penggunaan Alat/Cara KB di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020



Sumber : Diolah dari Susenas 2020, BPS Kab. HSS

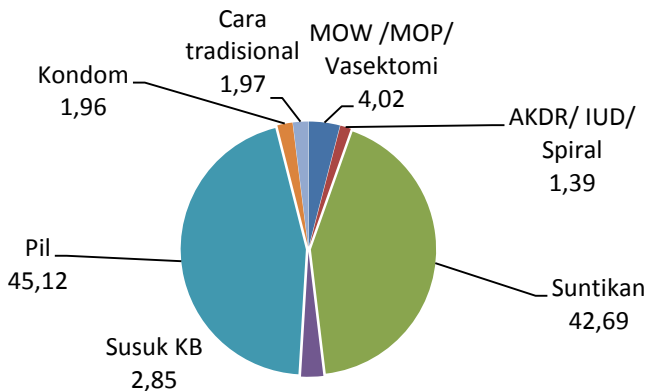
Grafik 2.14. pada tahun 2021 menunjukkan bahwa dari alat/cara KB yang digunakan, sebagian besar menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek (Non MKJP) seperti suntikan KB (45,73 persen), Pil (45,71 persen) dan kondom (0,13 persen). Sedangkan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti Tubektomi/MOW, vasektomi/MOP, IUD dan susuk KB/ Implan yaitu sebesar 7,75 persen. Sisanya 0,68 persen menggunakan cara/alat KB tradisional. Alat/cara KB yang digunakan pada tahun 2021 tidak berbeda jauh dengan penggunaan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa alat/cara KB yang diminati oleh sebagian besar wanita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah metode kontrasepsi jangka pendek (suntik KB dan Pil).

Grafik 2.14 Persentase Penduduk Wanita Usia 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Alat/Cara KB di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021



Sumber : Diolah dari Susenas 2021, BPS Kab. HSS

Grafik 2.15 Persentase Penduduk Wanita Usia 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Alat/Cara KB di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020



Sumber : Diolah dari Susenas 2020, BPS Kab. HSS

Catatan :

- MKJP = Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Meliputi Tubektomi/MOW, Vasektomi/MOP, IUD dan Susuk KB / Implan
- Non MJKP meliputi Suntikan KB, Pil dan Kondom
- Cara tradisional meliputi metode menyusui alami, pantang berkala / kalender dan lainnya

BAB III

KESEHATAN

Kesehatan tubuh kita adalah modal utama untuk menjalani hari dan meraih kesuksesan. Sebuah kesuksesan hidup akan terasa sia-sia jika kita meraihnya dalam keadaan sakit. Kesuksesan akan terasa lengkap jika kita dalam keadaan sehat dan kita bisa menikmati jerih payah kita selama ini. Untuk itu perlu adanya pembangunan bidang kesehatan untuk menjembatani agar masyarakat bisa meraih kesuksesan dalam keadaan sehat.

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Kesehatan merupakan salah satu aspek penting yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan suatu daerah. Semakin baik derajat kesehatan masyarakat mengindikasikan semakin baiknya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Tubuh yang sehat memungkinkan seseorang untuk melakukan berbagai macam kegiatan

sehingga memiliki kesempatan untuk mencapai hasil yang optimal.

Salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah dengan memperbanyak penyediaan fasilitas kesehatan sampai ke pelosok. Fasilitas utama yang diperlukan oleh masyarakat adalah puskesmas dan puskesmas pembantu, karena kedua fasilitas tersebut dapat menjangkau segala lapisan masyarakat hingga ke daerah terpencil. Selain itu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan sudah banyak dilakukan oleh pemerintah selama ini yaitu dengan memberikan penyuluhan kesehatan agar semua anggota keluarga berperilaku hidup sehat.

Tujuan diselenggarakan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing manusia Indonesia.

Pelayanan kesehatan di Indonesia dilaksanakan dengan tujuan peningkatan kesehatan melalui pencegahan penyakit,

penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan melalui rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, polindes, klinik, balai pengobatan, toko obat dan sarana lainnya. Indonesia saat ini menghadapi masalah kesehatan yang kompleks, disparitas pengetahuan kesehatan masyarakat tentang kesehatan masih amat besar, sementara masalah yang dihadapi makin beragam, oleh karena itu akses masyarakat ke pelayanan kesehatan harus dibuka. Pembangunan kesehatan membutuhkan sumber daya untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya kesehatan adalah perpaduan antara sumber daya teknologi, sumber daya manusia, dan manajemen dalam sektor kesehatan.

3.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Beragam indikator yang bisa dijadikan ukuran untuk melihat derajat kesehatan penduduk seperti angka kesakitan (*morbidity rate*) dan rata-rata lama sakit.

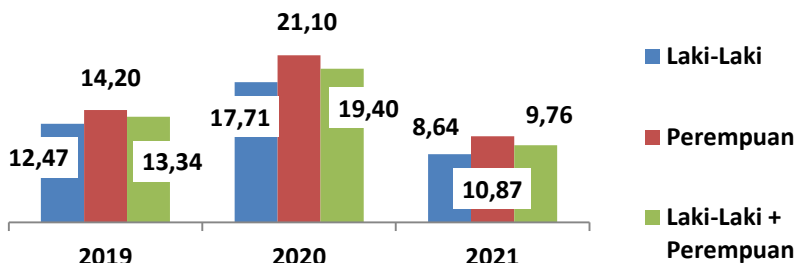
Angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari pada periode sebulan

terakhir sebelum pencacahan. Sebulan terakhir adalah jangka waktu satu bulan terakhir yang berakhir satu hari sebelum pencacahan. Sedangkan rata-rata lama sakit merupakan rata-rata lama hari penduduk menderita keluhan kesehatannya.

Berdasarkan data SUSENAS 2021, status kesehatan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercermin dari angka kesakitan yang sebesar 9,76 persen. Ini berarti pada periode satu bulan sebelum survei, ada sekitar sepersepuluh penduduknya mengalami gangguan kesehatan. Apabila dibanding dengan angka kesakitan tahun sebelumnya tahun (2020), maka terjadi penurunan angka kesakitan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021. Dimana angka kesakitan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2020 mencapai angka 19,40 persen. Perlu diketahui pendataan SUSENAS tahun 2020 diselenggarakan pada bulan maret yang merupakan awal-awal pandemi covid 19 masuk ke Indonesia sedangkan SUSENAS tahun 2021 diselenggarakan ditengah tengah pandemi covid 19 masih berlangsung. Pada saat pandemi covid 19 berlangsung tahun 2021, terjadi penurunan angka kesakitan. Penurunan ini terjadi di antaranya lebih siapnya masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menjaga kondisi daya tahan tubuhnya seperti

minum vitamin, jaga jarak, memakai masker (taat protocol kesehatan).

Grafik 3.1. Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2021 (persen)



Sumber : Diolah dari Susenas 2019-2021, BPS Kab. HSS

Pada Grafik 3.1. angka kesakitan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2021, terlihat bahwa sedikit lebih tinggi angka kesakitan penduduk perempuan jika dibandingkan penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan status kesehatan antara penduduk laki-laki dan perempuan hanya berbeda sedikit.

3.2 Cara Pengobatan, Fasilitas Kesehatan dan Kebiasaan Merokok

Pada tahun 2021 penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan lebih dari seperlima yang mengalami keluhan

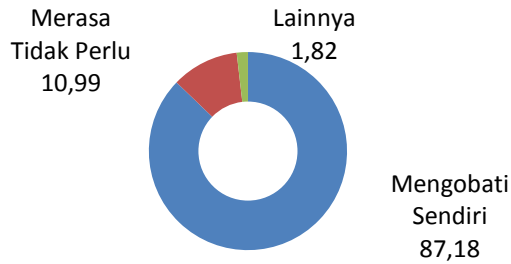
kesehatan dan melakukan pengobatan dengan cara berobat jalan ke tempat berobat yaitu 21,99 persen. Hal itu mungkin karena penduduk yang sakit menganggap keluhan yang diderita harus segera di obati ke fasilitas kesehatan. Persentase penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan menunjukkan persentase yang lebih tinggi (22,74 persen) dibandingkan persentase penduduk laki-laki (21,21 persen) dalam hal berobat jalan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2020), pada tahun 2021 persentase penduduk yang berobat jalan mengalami penurunan. Hal ini diantaranya disebabkan pada tahun 2021 sebagian besar masyarakat takut berobat jalan ke fasilitas kesehatan karena takut terinfeksi virus covid 19 dan menjalani isolasi mandiri, sehingga memilih mengobati sendiri.

Tabel 3.1. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2021 (%)

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
2019	30,91	37,25	34,41
2020	25,13	33,22	29,28
2021	21,21	22,74	21,99

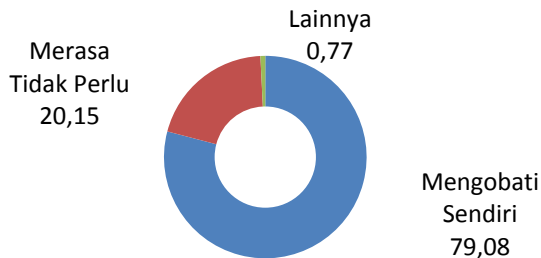
Sumber : Diolah dari Susenas 2019-2021, BPS Kab. HSS

Grafik 3.2. Persentase Penduduk yang Sakit tapi Tidak Berobat Jalan Sebulan Terakhir di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 (persen)



Sumber : Diolah dari Susenas 2021, BPS Kab. HSS

Grafik 3.3. Persentase Penduduk yang Sakit tapi Tidak Berobat Jalan Sebulan Terakhir di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 (persen)



Sumber : Diolah dari SUSENAS 2020, BPS Kab. HSS

Pada Grafik 3.2 menunjukkan dari hasil SUSENAS pada tahun 2021 alasan utama penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak berobat jalan paling banyak karena melakukan

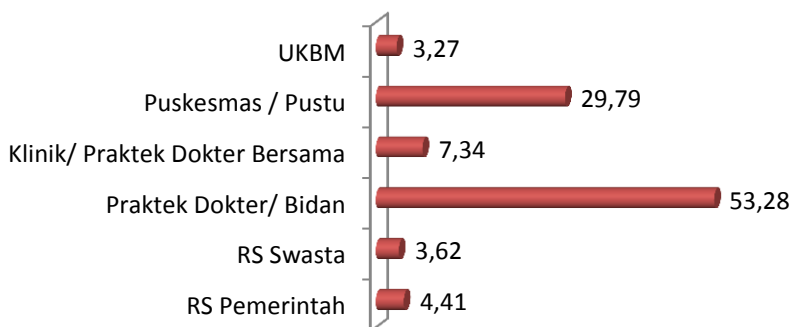
pengobatan dengan cara mengobati sendiri, yaitu dengan cara membeli obat sendiri ke warung atau ke toko obat kemudian dikonsumsi, berdasarkan diagnosa sendiri dengan persentase sebesar 87,18 persen dan yang merasa tidak perlu sebesar 10,99 persen. Hal itu mungkin karena masyarakat yang sakit menganggap keluhan yang diderita hanya berupa sakit ringan saja dan dapat diobati sendiri atau sembuh dengan sendirinya sehingga tidak perlu pergi ke fasilitas kesehatan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2020) terjadi peningkatan persentase penduduk yang sakit memilih untuk mengobati sendiri (2020=79,08 persen).

Tinggi rendahnya taraf kesehatan suatu daerah sangat tergantung pada upaya masyarakat untuk memperbaiki tingkat kesehatan dan gizinya. Tinggi rendahnya upaya ini dapat diukur dari sejauh mana fasilitas dan pelayanan kesehatan yang tersedia seperti berbagai sarana kesehatan, tenaga kesehatan dan penyediaan obat. Penyediaan berbagai macam fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan lainnya merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan pemberian penanganan yang lebih dalam mengatasi keluhan kesehatan masyarakat melalui fasilitas yang sudah

tersedia. Selanjutnya tergantung kepada kesadaran masyarakat untuk memanfaatkannya yaitu dengan mengunjungi fasilitas-fasilitas tersebut sebagai upaya untuk memperbaiki taraf kesehatannya.

Salah satu indikator pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kesehatan adalah banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berobat jalan ke fasilitas kesehatan yang ada. Berdasarkan SUSENAS 2020-2021, praktek dokter/bidan/tenaga kesehatan dan puskesmas/pustu masih menjadi tempat berobat jalan yang paling banyak dikunjungi oleh penduduk yang mengalami keluhan kesehatan.

Grafik 3.4. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 (%)



Sumber : Diolah dari Susenas 2021, BPS Kab. HSS

Grafik 3.5. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 (%)



Sumber : Diolah dari Susenas 2020, BPS Kab. HSS

Dari Grafik 3.4. dapat dilihat bahwa dari seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada tahun 2021 terbanyak yang dikunjungi untuk berobat jalan adalah ke praktek dokter/bidan/perawat yaitu sebanyak 53,28 persen. Disusul ke puskesmas/pustu sebesar 29,79 persen, berobat ke ke praktek/klinik dokter bersama sebesar 7,34 persen dan berobat ke rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta sebesar 8,03 persen. Sedangkan sisanya ke UKBM (Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan) sebesar 3,27 persen. Besarnya persentase penduduk yang

berobat jalan ke praktek dokter/bidan/perawat adalah merupakan tanda kesadaran masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan betapa penting dan bernilainya kesehatan. Mereka rela membayar lebih atas pelayanan kesehatan yang diberikan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2020), terjadi penurunan kunjungan ke puskesmas/ pustu dan rumah sakit pada tahun 2021 yang masih dilanda pandemi covid 19. Hal ini diantaranya karena sebagian besar masyarakat memilih tidak berobat jalan ke puskesmas/ pustu atau rumah sakit karena takut divonis terkena covid 19 sehingga harus isolasi mandiri. Untuk itu diperlukan perhatian khusus agar puskesmas/pustu dan rumah sakit tidak dipandang sebagai fasilitas yang mengcovidkan pasien serta perlu terus peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan di puskesmas sebagai fasilitas kesehatan yang murah dan mudah mengaksesnya dan rumah sakit pemerintah sebagai fasilitas kesehatan yang lengkap pelayanannya.

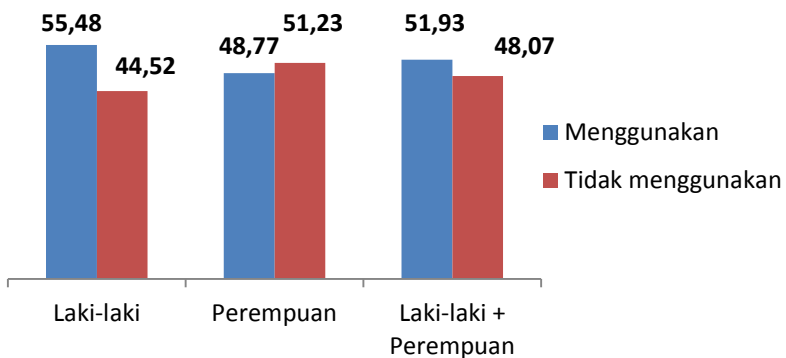
Jangan mau menjadi sadikin, "**sakit sedikit, langsung miskin**". Karena mereka tak punya biaya berobat, apalagi berbiaya besar dari tindakan operasi. Sungguh memberatkan...! Padahal, semua Warga Indonesia dapat terhindar dari musibah ini. Salah satunya adalah dengan memiliki jaminan kesehatan.

Tidak ada orang yang ingin atau berencana jatuh sakit. Punya jaminan/asuransi kesehatan bukan berarti Anda seperti merencanakan jatuh sakit di kemudian hari. Sama halnya seperti peribahasa, “Sedia payung sebelum hujan”, jaminan/asuransi kesehatan bisa dianggap seperti payung kesehatan anda. Tak perlu sakit dulu untuk punya jaminan/asuransi kesehatan. Saat sakit, kita tidak perlu pusing memikirkan berapa besar biaya pengobatan yang akan kita keluarkan. Sehingga kita bisa lebih tenang dan fokus pada proses pengobatan dan perawatan yang akan dijalani untuk penyembuhan.

Berdasarkan data Susenas 2021, Persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan pada tahun 2021 lebih dari separuh dari penduduk yang berobat jalan (51,93 persen). Dari data tersebut menunjukkan sebagian besar penduduk yang berobat jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggunakan jaminan kesehatan. Dari 48,07 persen yang tidak menggunakan jaminan kesehatan, kemungkinan karena belum mempunyai jaminan kesehatan atau sudah memiliki jaminan kesehatan tetapi tidak menggunakan jaminannya dengan alasan beberapa faktor. Jaminan kesehatan yang dimiliki adalah jaminan dalam

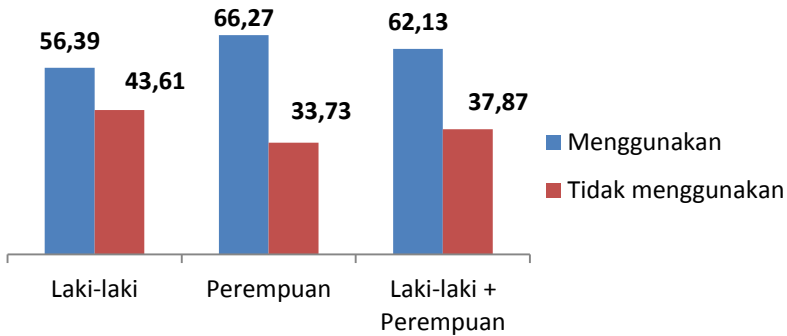
bentuk kartu atau apapun yang dapat digunakan untuk pembiayaan kesehatan bila nama yang tertera dalam kartu atau lainnya melakukan perawatan kesehatan seperti: ke dokter, puskesmas, rumah sakit, dan sebagainya. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2020), pada tahun 2021 persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan mengalami penurunan. Salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya penggunaan jaminan kesehatan adalah penurunan penduduk yang berobat jalan ke fasilitas kesehatan.

Grafik 3.6. Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021



Sumber : Diolah dari Susenas 2021, BPS Kab. HSS

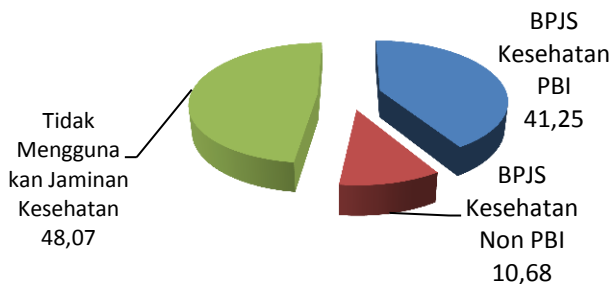
Grafik 3.7. Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020



Sumber : Diolah dari Susenas 2020, BPS Kab. HSS

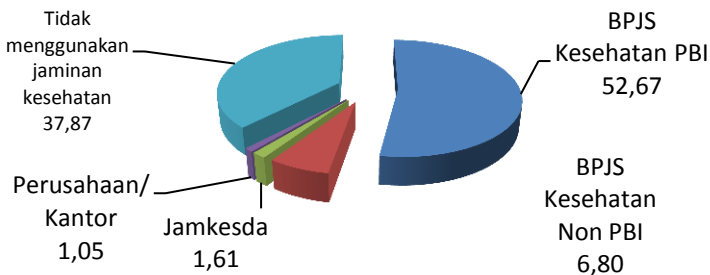
BPJS Kesehatan merupakan fasilitas jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat yang tercatat sebagai anggota. Keanggotaan BPJS Kesehatan ini sendiri dibagi menjadi dua kategori, yaitu peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan BPJS Non Penerima Bantuan Iuran atau yang biasa disebut dengan BPJS Non PBI. Disebut sebagai keanggotaan BPJS PBI karena para peserta menerima bantuan iuran dari pemerintah yang iuran bulanannya dibayar juga oleh pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan peserta Non Penerima Bantuan Iuran merupakan peserta BPJS yang iuran bulanannya dibayar sendiri oleh peserta.

Grafik 3.8. Persentase Penduduk Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Jaminan Kesehatan yang Digunakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021



Sumber : Diolah dari Susenas 2021, BPS Kab. HSS

Grafik 3.9. Persentase Penduduk Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Jaminan Kesehatan yang Digunakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020



Sumber : Diolah dari Susenas 2020, BPS Kab. HSS

Pada Grafik 3.8 menunjukkan pada tahun 2021, persentase penduduk berobat jalan selama sebulan terakhir yang menggunakan jaminan kesehatan sebagian besar menggunakan BPJS Kesehatan PBI yaitu sebesar 41,25 persen.

Kemudian disusul BPJS Kesehatan Non PBI sebesar 10,68 persen. Sedangkan yang tidak menggunakan jaminan kesehatan sebesar 48,07 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya jaminan kesehatan yang paling banyak digunakan adalah BPJS Kesehatan PBI. Dengan adanya jaminan kesehatan, ketika sakit kita tidak perlu khawatir mengeluarkan uang secara mendadak, karena kita mempunyai jaminan kesehatan yang akan menanggung biaya pengobatan kita.

Tabel 3.2. Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021

Kepemilikan Jaminan Kesehatan	2021		
(1)	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Memiliki	91,63	92,09	91,86
BPJS Kesehatan PBI	78,36	79,11	78,74
BPJS Kesehatan Non PBI PBI/ Mandiri	11,77	11,43	11,60
Jamkesda	0,19	0,77	0,48
Perusahaan/ Kantor	1,30	0,77	1,04
Tidak Memiliki	8,37	7,91	8,14

Sumber : Diolah dari Susenas 2021, BPS Kab. HSS

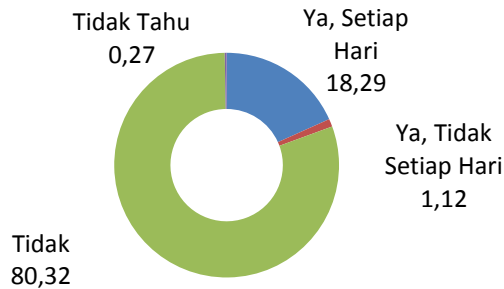
BPJS semesta yang menjadi program Pemkab Hulu Sungai Selatan untuk melindungi kesehatan masyarakat Hulu

Sungai Selatan direalisasikan mulai tahun 2019. Disebutkan bahwa masyarakat akan mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan meskipun hanya mendapatkan fasilitas kelas tiga. Pemberian jaminan kesehatan secara gratis kepada seluruh masyarakat HSS dalam program BPJS semesta terus berlangsung sampai saat ini. Pada Tabel 3.2, pada tahun 2021 persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan lebih dari 90 persen (91,86 persen). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah terjamin dalam hal pembiayaan kesehatan karena sebagian besar penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah memiliki jaminan kesehatan.

Merokok sudah dikenal masyarakat sebagai salah satu penyebab kematian yang cukup besar di dunia. Berbagai penelitian telah membuktikan ada banyak bahaya merokok bagi kesehatan. Di antaranya yaitu asma, infeksi paru-paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker paru-paru, serangan jantung, stroke, demensia, disfungsi ereksi (impoten), dan sebagainya. Bahkan bahaya merokok bagi kesehatan ini tidak hanya berlaku bagi perokok saja. Pasalnya, orang-orang yang ada di sekitar perokok pun berisiko tinggi terkena efek rokok tersebut, meskipun mereka sendiri tidak merokok.

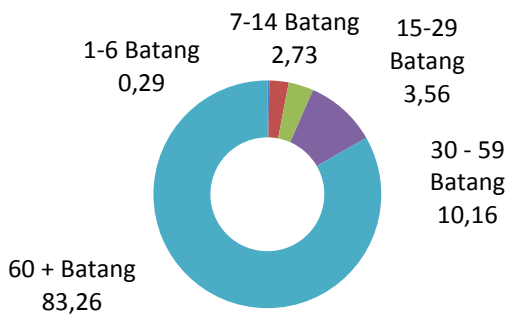
Pada Grafik 3.10 menunjukkan persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang merokok tembakau dalam sebulan terakhir dan kebiasaan merokok di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 18,29 persen merokok tiap hari pada tahun 2021. Kemudian dari penduduk 5 tahun ke atas yang merokok tembakau dalam sebulan terakhir di Kabupaten Hulu Sungai Selatan paling banyak persentase penduduknya yang menghisap rokok 60 batang bahkan lebih per minggunya yaitu sebesar 83,26 persen. Jika dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2020), pada tahun 2021 terjadi kenaikan penduduk yang merokok tiap hari. Selain itu juga terjadi kenaikan persentase penduduk yang jumlah batang rokok yang di hisap 60 batang/lebih perminggu. Hal tersebut menunjukkan bahwa lebih dari sepersepuluh penduduk usia 5 tahun ke atas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai kebiasaan merokok tiap hari dan lebih dari tiga perempat penduduk usia 5 tahun ke atas yang merokok jumlah batang yang di hisap 60 batang atau lebih. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk hidup pola sehat tanpa merokok yang sangat merugikan pada kesehatan.

Grafik 3.10. Persentase Penduduk 5 Tahun Ke atas yang Merokok Tembakau dalam Sebulan Terakhir Menurut Kebiasaan Merokok di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021



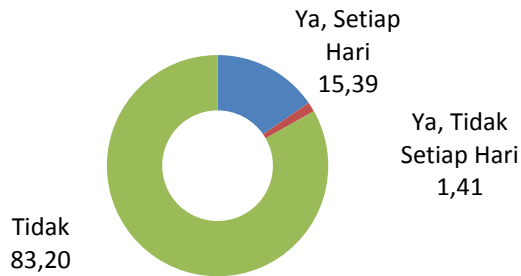
Sumber : Diolah dari Susenas 2021, BPS Kab. HSS

Grafik 3.11. Persentase Penduduk 5 Tahun Ke atas yang Merokok Tembakau dalam Sebulan Terakhir Menurut Jumlah Batang Rokok yang Dihisap per Minggu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021



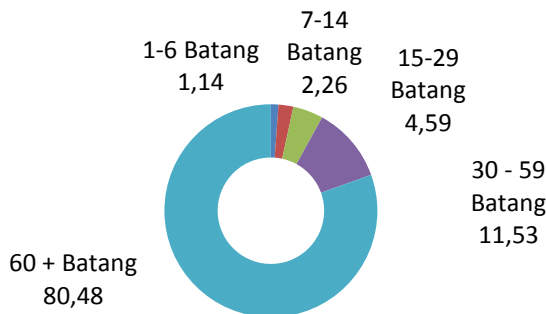
Sumber : Diolah dari Susenas 2021, BPS Kab. HSS

Grafik 3.12. Persentase Penduduk 5 Tahun Ke atas yang Merokok Tembakau dalam Sebulan Terakhir Menurut Menurut Kebiasaan Merokok di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020



Sumber : Diolah dari Susenas 2020, BPS Kab. HSS

Grafik 3.13. Persentase Penduduk 5 Tahun Ke atas yang Merokok Tembakau dalam Sebulan Terakhir Menurut Menurut Jumlah Batang Rokok yang Dihisap per Minggu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020



Sumber : Diolah dari Susenas 2020, BPS Kab. HSS

Berdasarkan keadaan tersebut, masih banyak penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berisiko penyakit kanker paru-paru, penyakit jantung, stroke, bahkan kematian

akibat merokok. Bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali. Asap rokok bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru pada perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok namun tetap menghirup asapnya. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pemerintah Daerah telah berusaha menekan dampak buruk rokok dengan menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR). KTR sendiri adalah ruangan atau area yang dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan produk tembakau. Fasilitas publik yang kerap diberlakukan kawasan tanpa rokok ini meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum. Diharapkan dengan diterapkan peraturan tersebut masyarakat mematuhi sehingga tujuan dari penerapan peraturan tersebut dapat tercapai.

3.3 Penolong Proses Persalinan dan Air Susu Ibu

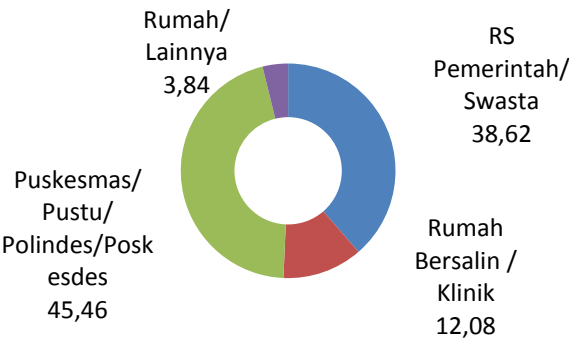
Proses persalinan berkaitan erat dengan keselamatan bayi yang dilahirkan dan sang ibu yang melahirkan. Penanganan yang tepat oleh tenaga penolong berkualitas merupakan hal yang penting karena resiko kematian yang dapat terjadi sangat tinggi.

Target *Sustainable Development Goals (SDGs)* bidang kesehatan yang berkaitan dengan kematian bayi dan kematian ibu adalah target 3. Target ini berkaitan dengan penurunan kematian bayi (mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah, dengan menurunkan angka kematian neonatal hingga 2 per 1000 kelahiran hidup) dan penurunan angka kematian ibu (mengurangi angka kematian Ibu hingga dibawah 70 per 100.000 kelahiran hidup). Cakupan persalinan yang tinggi dan yang memenuhi standar persalinan merupakan indikator *proxy* dari angka kematian bayi. Untuk mempercepat pencapaian target SDGs, Kementerian Kesehatan telah menetapkan kebijakan bahwa semua persalinan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dan memulai program Jampersal (jaminan Persalinan), yaitu suatu paket program yang mencakup pelayanan antenatal, persalinan, posnatal dan keluarga berencana.

Pada Grafik 3.14 Menunjukkan 96,16 persen wanita pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir melahirkan di fasilitas kesehatan yaitu 38,62 persen melahirkan di rumah sakit, 45,46 persen di Puskesmas/Pustu/Polindes/Poskesdes, 12,08 persen di rumah bersalin/ klinik dan 3,84 persen di Rumah/lainnya.

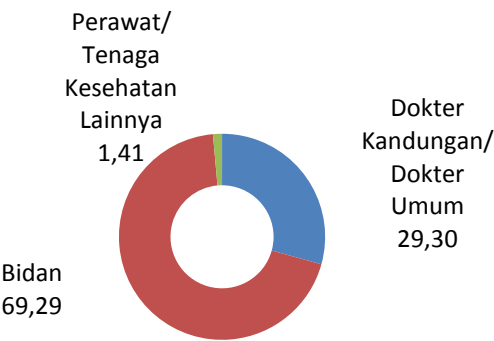
Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan ibu dan anak sewaktu persalinan sudah baik.

Grafik 3.14. Persentase Wanita Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Tempat Melahirkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021



Sumber: Diolah dari Susenas 2021, BPS Kab. HSS

Grafik 3.15. Persentase Wanita Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Penolong Kelahiran Terakhir di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021



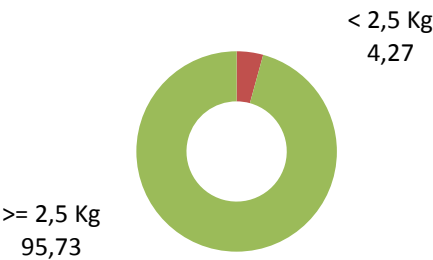
Sumber: Diolah dari Susenas 2021, BPS Kab. HSS

Pada Grafik 3.10 menunjukkan bahwa 84,49 persen wanita pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir melahirkan di fasilitas kesehatan yaitu 56,64 persen melahirkan di rumah sakit, 21,07 persen di Puskesmas/Pustu/Polindes/Poskesdes, 3,17 di praktek tenaga kesehatan, 3,61 persen di rumah bersalin/ klinik dan 15,51 persen di Rumah/lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan ibu dan anak sewaktu persalinan sudah baik.

Berdasarkan data SUSENAS tahun 2021 hampir semua wanita pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir mendapatkan pertolongan persalinan dari tenaga paramedis seperti seperti dokter, perawat dan bidan. Ini berarti program pemerintah dengan menempatkan bidan di desa (BdD) dalam rangka pengurangan tingkat kematian bayi dan ibu mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya persalinan yang ditolong oleh tenaga bidan yang persentasinya menduduki urutan pertama dalam menolong persalinan yaitu 69,29 persen.

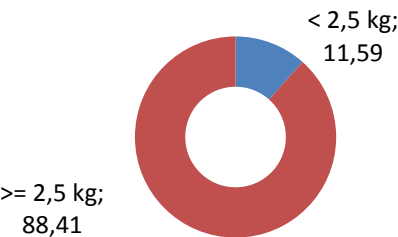
Berat lahir bayi mencerminkan hasil perkembangan dalam kandungan dan kecukupan nutrisi bayi saat dilahirkan. Bayi dikatakan memiliki berat lahir rendah atau BBLR apabila memiliki berat badan kurang dari 2500gr (2,5 kg). Beberapa klasifikasi lain untuk berat lahir rendah adalah: berat lahir sangat rendah jika di bawah 1,5 kg, dan berat lahir rendah ekstrem jika di bawah 1 kg. Berat lahir rendah tidak hanya mempengaruhi kondisi bayi saat dilahirkan tetapi juga kesehatan bahkan kelangsungan hidup bayi. Pada umumnya, bayi yang dilahirkan prematur atau kurang dari 37 minggu usia kandungan memiliki berat lahir yang lebih rendah dari bayi normal. Di samping jangka waktu kehamilan, berat lahir bayi ditentukan oleh beberapa faktor yang pada umumnya berkaitan dengan kesehatan ibu dan kesehatan saat kehamilan. Bayi prematur, terutama bayi dengan berat badan di bawah 1.500 gram, sangat rentan mengalami hipotermia yang dapat mengancam nyawa si kecil. Itulah sebabnya bayi prematur, terutama bayi dengan berat lahir sangat rendah, perlu ditempatkan di dalam inkubator. Selain menjaga suhu yang sesuai untuk bayi, perawatan di inkubator juga dapat mencegah paparan infeksi dari dunia luar.

Grafik 3.16. Persentase Penduduk Wanita Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun Yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Berat Badan Anak Lahir Hidup yang Terakhir ketika Dilahirkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021



Sumber: Diolah dari Susenas 2021, BPS Kab. HSS

Grafik 3.17. Persentase Penduduk Wanita Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun Yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Berat Badan Anak Lahir Hidup yang Terakhir ketika Dilahirkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020



Sumber: Diolah dari Susenas 2020, BPS Kab. HSS

Pada Grafik 3.16 dari hasil SUSENAS tahun 2021 menunjukkan pada tahun 2021 masih ada bayi yang lahir

dengan berat lahir rendah (<2500 gram) yaitu 4,27 persen dari Wanita Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun Yang Melahirkan Anak Lahir Hidup terlahir Dalam 2 Tahun Terakhir. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah agar bayi berat lahir rendah mendapatkan perawatan atau tindakan medis agar bayi berat lahir rendah bisa bertahan hidup dan sehat. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2020), pada tahun 2021 terjadi penurunan bayi yang lahir dengan berat badan lahir < 2.500 gram. Diharapkan tren menurun ini terus berlanjut ke tahun-tahun selanjutnya sehingga semua bayi yang dilahirkan memiliki berat badan lahir yang normal (> 2,5 kg).

Air susu ibu (ASI) adalah makanan terbaik untuk bayi. Tidak ada satupun makanan lain yang dapat menggantikan ASI, lebih-lebih ASI yang pertama kali keluar (*collustrum*), karena ASI mempunyai kelebihan yang meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek gizi, aspek kekebalan, dan aspek kejiwaan, berupa jalinan kasih sayang yang penting untuk perkembangan mental dan kecerdasan anak.

Tabel 3.3. menampilkan persentase baduta yang pernah disusui. Dari total baduta tahun 2021 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada 91,27 persen baduta pernah diberi

ASI. Ini menunjukkan kesadaran Ibu di Kabupaten Hulu Sungai selatan akan pentingnya pemberian ASI kepada bayinya sudah baik (lebih dari 90 persen) walaupun ada penurunan jika dibandingkan tahun 2020. Banyak hal yang menyebabkan seorang bayi tidak menerima ASI, antara lain ASI tidak mau keluar, bayi menolak untuk disusui karena lebih menyukai dot dan ibu bayi sudah tidak ada. Sangat kecil kemungkinan seorang ibu tidak mau menyusui anaknya dengan alasan mengurangi keindahan bentuk payudara.

Tabel 3.3. Persentase Baduta (Umur 0-23 Bulan) Yang Pernah Diberi ASI di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2021

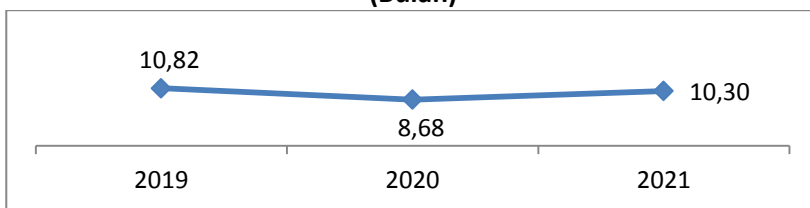
Anak Usia 0-23 Bulan yang Pernah Diberi ASI	Persentase 2020	Persentase 2021
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	99,98	89,83
Perempuan	87,00	92,25
Laki-laki + Perempuan	94,45	91,27

Sumber: Diolah dari Susenas 2020-2021, BPS Kab. HSS

Seorang ibu dianjurkan untuk menyusui bayinya selama dua tahun karena semakin lama bayi mendapatkan ASI akan memberikan kekebalan/proteksi yang lebih kuat. Pada tahun 2021, rata-rata lama baduta diberikan ASI antara 10 sampai 11 bulan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya

(2020) terjadi kenaikan lama pemberian ASI pada baduta di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021. Diharapkan kedepannya para ibu bisa memberikan ASI selama 2 tahun sejak bayi dilahirkan.

Grafik 3.18. Rata-Rata Lama Baduta (Umur 0-23 Bulan) Diberikan ASI di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019,2020 dan 2021 (Bulan)

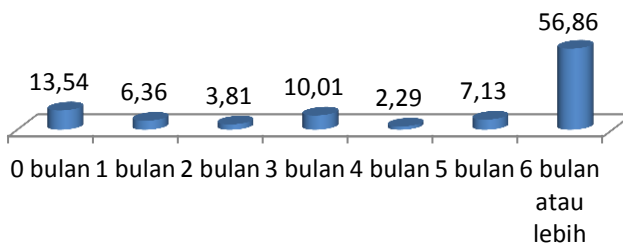


Sumber: Diolah dari Susenas 2019-2021, BPS Kab. HSS

Kurangnya pengetahuan tentang manfaat ASI dan gencarnya promosi susu formula membuat seorang ibu gagal menyusui secara eksklusif. Seharusnya pada usia 0-6 bulan, bayi cukup diberi ASI saja (ASI eksklusif), karena periode tersebut pemberian ASI saja akan mencukupi kebutuhan bayi untuk tumbuh kembang sehat. Pemberian makanan selain ASI pada umur 0-6 bulan cukup berbahaya bagi bayi, karena bayi belum mampu memproduksi enzim untuk mencerna makanan selain ASI. Jika pada periode ini, bayi dipaksa menerima makanan selain ASI, maka akan muncul gangguan kesehatan seperti diare, alergi dan bahaya lain yang berakibat fatal bagi

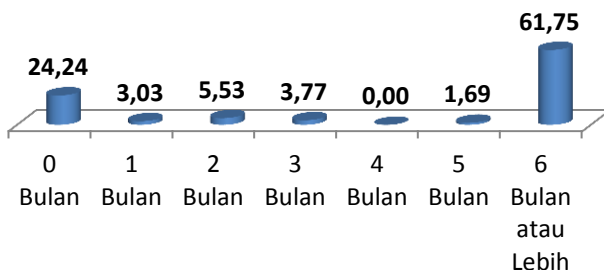
keselamatan bayi.

Grafik 3.19. Persentase Baduta (Umur 7-23 Bulan) Yang Pernah Diberi ASI Menurut Lamanya Pemberian ASI tanpa Makanan Pendamping (Bulan) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021



Sumber: Diolah dari Susenas 2021, BPS Kab. HSS

Grafik 3.20. Persentase Baduta (Umur 7-23 Bulan) Yang Pernah Diberi ASI Menurut Lamanya Pemberian ASI tanpa Makanan Pendamping (Bulan) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020



Sumber: Diolah dari Susenas 2020, BPS Kab. HSS

Pada tahun 2021, dari seluruh bayi usia 7 – 23 bulan yang di susui di Kabupaten Hulu Sungai Selatan lebih dari

separuh bayi usia 7 – 23 bulan (56,86 persen) yang menerima ASI dan eksklusif. Persentase pada tahun 2021 ini lebih rendah dibanding tahun 2020 (61,75 persen). Persentase bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif disebabkan antara lain ibu masih kurang yakin akan manfaat menyusui dan ibu tidak cukup mendapatkan tentang informasi secara benar. Kondisi lingkungan yang belum sepenuhnya mendukung/melindungi ibu untuk menyusui, pemasaran susu formula yang belum tertib yang melibatkan petugas atau institusi kesehatan serta keberadaan konselor yang belum memadai juga merupakan penyebab masih rendahnya pemberian ASI eksklusif. Oleh karena itu diharapkan perhatian pemerintah untuk lebih gencar mengadakan sosialisasi ke masyarakat pentingnya pemberian ASI eksklusif.

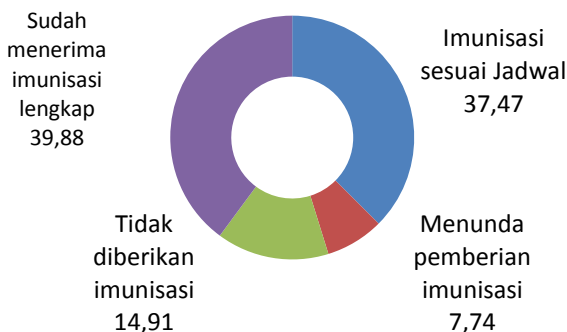
Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B. Seorang anak dikatakan mendapat imunisasi lengkap dan tepat waktu jika mendapatkan imunisasi sesuai dengan Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Pemberian Imunisasi Secara Lengkap dan tepat waktu

No	Umur	Jenis Imunisasi
(1)	(2)	(3)
1	< 7 hari	Hepatitis B0
2	1 bulan	BCG, Polio 1
3	2 bulan	DPT 1 - Hepatitis B1, Polio 2
4	3 bulan	DPT 2 - Hepatitis B2, Polio 3
5	4 bulan	DPT 3 – Hepatitis B3, Polio 4
6	9 bulan	Campak

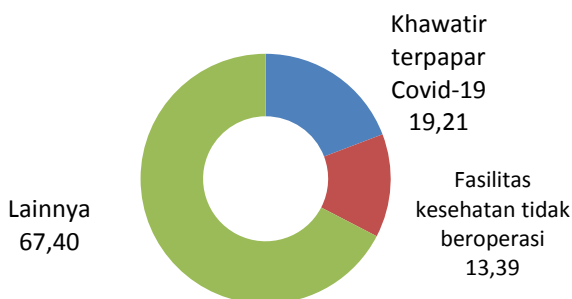
Sejak pandemi covid 19 memasuki Indonesia pada awal tahun 2020 banyak mempengaruhi perubahan pola hidup masyarakat. Selama pandemi covid 19 (maret 2020 s.d maret 2021), Persentase Balita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menunda pemberian imunisasi sebesar 7,74 persen dan 14,91 persen yang tidak diberikan imunisasi. Alasan utama menunda atau tidak melakukan imunisasi kepada balita adalah alasan lainnya seperti takut anaknya sakit kalau di imunisasi dengan persentase 67,40 persen. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah supaya imunisasi tidak menjadi sesuatu yang ditakuti oleh masyarakat untuk meimunisasikan anaknya. Melalui Posyandu sebagai salah satu tempat imunisasi menjadi pintu gerbang kesehatan untuk anak-anak di Indonesia menuju anak Indonesia yang sehat dan kuat. Sehingga menjadi penerus bangsa yang berkualitas.

Grafik 3.21. Persentase Anak Usia 0-59 Bulan Selama Pandemi Covid-19 (Maret 2020 s.d Saat Pencacahan Maret 2021) Menurut Perlakuan Pemberian Imunisasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021



Sumber: Diolah dari Susenas 2021, BPS Kab. HSS

Grafik 3.22. Persentase Anak Usia 0-59 Menurut Alasan Utama Menunda atau Tidak Memberikan Imunisasi Kepada Balita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021



Sumber: Diolah dari Susenas 2021, BPS Kab. HSS

Grafik 3.23. Persentase Anak Usia 0-59 Bulan yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021



Sumber: Diolah dari Susenas 2021, BPS Kab. HSS

Grafik 3.24. Persentase Anak Usia 0-59 Bulan yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenisnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020



Sumber: Diolah dari Susenas 2020, BPS Kab. HSS

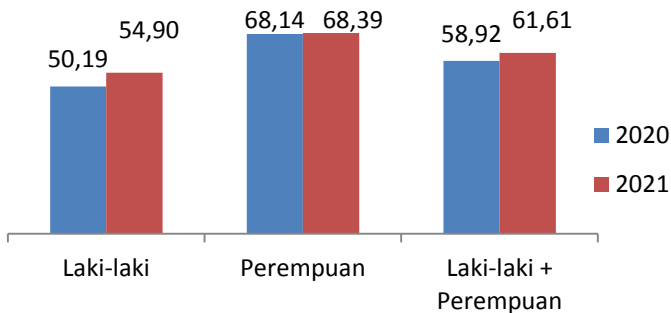
Dari Grafik 3.23 dapat dilihat bahwa masih terdapat anak Usia 0 – 59 bulan yang belum pernah mendapat imunisasi walaupun dalam persentase yang tidak signifikan. Untuk bayi usia dibawah 9 bulan masih belum waktunya mendapatkan imunisasi campak. Ini juga berarti bahwa imunisasi belum menjangkau semua sasaran terutama untuk frekuensi yang di anjurkan (Tabel 3.4). Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih

mengembangkan pelayanan imunisasi di antaranya dengan mengoptimalkan peran posyandu dan meningkatkan upaya dalam hal sosialisasi pentingnya imunisasi sebagai bentuk intervensi kesehatan yang sangat efektif dalam menurunkan angka kematian bayi dan balita. Orang tua juga harus mengetahui bahwa pemberian imunisasi aman bagi anak dan agar lebih memperhatikan jadwal pemberian imunisasi.

Bayi yang kelihatannya sehat belum tentu kebal terhadap serangan penyakit berbahaya. Membawa bayi kita ke Posyandu atau tempat pelayanan kesehatan lainnya untuk mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap sesuai jadwal adalah wujud kasih sayang dan tanggung jawab melindungi buah hati tercinta. Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap berguna untuk memberi perlindungan menyeluruh terhadap penyakit-penyakit yang berbahaya. Dengan memberikan Imunisasi Dasar Lengkap sesuai jadwal, tubuh bayi dirangsang untuk memiliki kekebalan sehingga tubuhnya mampu bertahan dari melawan serangan penyakit berbahaya. Pada Grafik 3.25, pada tahun 2021 persentase bayi usia 0-59 bulan yang sudah mendapat imunisasi lengkap yaitu 61,61 persen. Jika dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2020) terjadi penurunan persentase balita yang mendapatkan imunisasi

lengkap. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menyadarkan orang tua akan pentingnya anaknya diberi imunisasi lengkap terutama imunisasi dasar.

Grafik 3.25. Persentase Anak Usia 0 – 59 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Lengkap (1-3-3-1-3) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 -2021



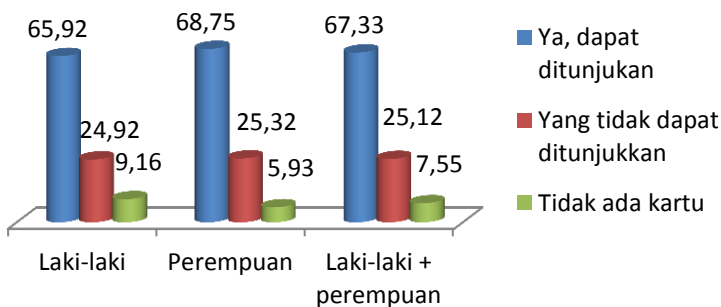
Sumber: Diolah dari Susenas 2020-2021, BPS Kab. HSS

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/SK/III/2004, Kementerian Kesehatan menetapkan buku KIA menjadi satu-satunya alat pencatatan pelayanan kesehatan ibu dan anak sejak ibu hamil, melahirkan dan selama nifas hingga bayi yang dilahirkan berumur 5 tahun. Hal ini termasuk pelayanan imunisasi, gizi, tumbuh kembang anak dan KB. Buku KIA menggabungkan beberapa catatan kesehatan di komunitas seperti Kartu Menuju

Sehat (KMS), kartu imunisasi dan kartu ibu. Buku ini juga berisi informasi penting tentang kesehatan ibu dan anak yang perlu dilakukan ibu, suami dan keluarganya secara singkat serta padat. Informasi tersebut termasuk mengenai kewaspadaan keluarga dan masyarakat tentang kesakitan, masalah kegawatdaruratan pada ibu hamil, bayi baru lahir serta balita. Sehingga buku KIA menyumbang penurunan angka kematian bayi dan balita.

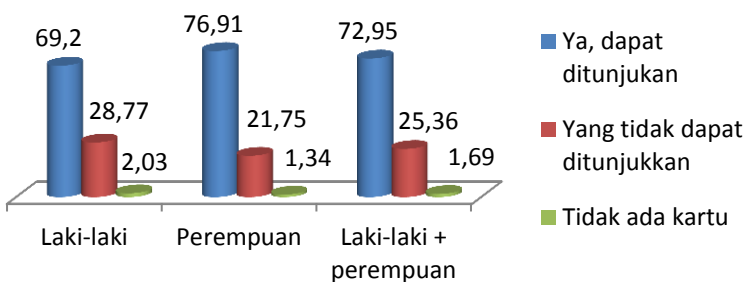
Pada Grafik 3.26, menunjukkan pada tahun 2021 persentase balita yang mempunyai kartu imunisasi (KIA/KMS) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 92,45 persen, dan yang dapat menunjukkan KIA/KMS sebesar 67,33 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya (2020) terjadi penurunan persentase balita yang memiliki KIA/KMS. Diharapkan kedepannya kepemilikan KIA/KMS bisa mencapai 100 persen dan dibarengi dengan pencacatan kesehatan ibu dan anak yang terpantau sehingga buku KIA/KMS dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Grafik 3.26. Persentase Anak Usia 0 – 59 Bulan Yang Mempunyai Kartu Imunisasi (KIA/KMS) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021



Sumber: Diolah dari Susenas 2021, BPS Kab. HSS

Grafik 3.27. Persentase Anak Usia 0 – 59 Bulan Yang Mempunyai Kartu Imunisasi (KIA/KMS) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020



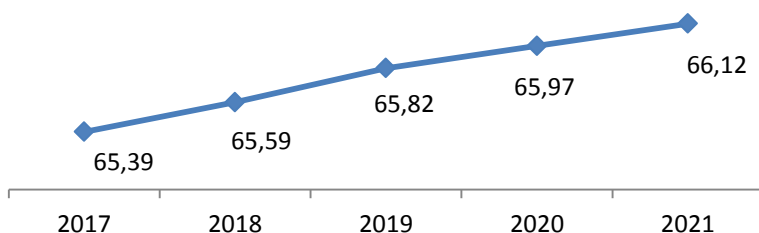
Sumber: Diolah dari Susenas 2020, BPS Kab. HSS

3.4 Umur Harapan Hidup

Sebagai salah satu indikator kesehatan, umur harapan hidup (UHH) digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang dapat diartikan jumlah tahun yang

diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya dibidang kesehatan.

Grafik 3.28 Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2021 (Tahun)



Sumber : IPM Metode Baru 2017-2021, BPS Kab. HSS

Pada Grafik 3.28 memperlihatkan perkembangan UHH selama kurun waktu 2017-2021, umur harapan hidup penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021 mengalami peningkatan umur harapan hidup sebesar 0,15 tahun di bandingkan tahun 2020 menjadi 66,12 tahun, peningkatan tersebut sama besar jika dibandingkan peningkatan pada tahun 2019 ke tahun 2020. Umur harapan hidup penduduk di

Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021 tercatat 66,12 tahun yang berarti umur yang diharapkan dapat dicapai bayi yang baru lahir tahun 2021 untuk hidup mencapai 66,12 tahun.

BAB IV

PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan kunci utama bagi suatu negara untuk unggul dalam persaingan global. Pendidikan dianggap sebagai bidang yang paling strategis untuk mewujudkan kesejahteraan nasional. Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas dan berkarakter merupakan prasyarat terbentuknya peradaban yang tinggi. Sebaliknya, SDM yang rendah akan menghasilkan peradaban yang kurang baik pula.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu UU No 20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap - tiap warga negara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Kualitas sumber daya manusia antara lain dapat dilihat dari tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan rakyat suatu bangsa maka semakin besar akses dan peluang bangsa tersebut untuk berkembang dalam era globalisasi yang semakin nyata. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa negara yang memprioritaskan pembangunan pendidikan tumbuh lebih cepat dibandingkan negara yang kurang memperhatikan masalah pendidikan.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka

Partisipasi Murni (APM). Indikator- indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS.

4.1 Angka Melek Huruf

Seseorang dikatakan melek huruf apabila paling tidak orang tersebut dapat menggunakan kemampuan baca dan tulis dengan huruf latin dan berhitung dengan angka arab dalam kegiatannya memerlukan kecakapan tersebut dan juga memungkinkannya untuk melanjutkan pemanfaatan kecakapan membaca, menulis dan berhitung untuk pengembangan diri dan masyarakat. Semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Baik angka melek huruf maupun angka buta huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf.

Program pemberantasan buta huruf sebetulnya sudah berjalan sejak lama, namun tidak semua masyarakat mengikuti program tersebut karena faktor usia. Banyak masyarakat pedesaan yang sudah lanjut usia buta huruf, tetapi masyarakat tersebut tidak tertarik lagi mengikuti program pemberantasan buta huruf, sehingga angka buta huruf susah

diturunkan untuk kelompok umur tua.

Tabel 4.1. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2021

Kemampuan Membaca dan Menulis	Jenis Kelamin					
	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
# Mampu Baca Tulis (melek huruf)	99,09	99,44	96,66	97,46	97,86	98,43
Huruf Latin	99,09	99,44	99,66	97,18	97,86	98,29
Huruf Arab	69,35	50,21	69,99	53,57	69,67	51,91
Lainnya	0,75	0,75	0,48	0,08	0,61	0,43
# Buta Huruf	0,91	0,56	3,34	2,54	2,14	1,57

Sumber : Diolah dari Susenas 2019-2020, BPS Kab. HSS

Pada tahun 2021 angka melek huruf penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mencapai angka 98,43 persen. Jika dilihat dari jenis kelamin nampak bahwa kemampuan membaca dan menulis penduduk perempuan lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki. Selain itu, angka melek huruf tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan angka melek huruf tahun 2020 (97,86 persen).

Pada Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa masih ada penduduk buta huruf yaitu sebesar 1,57 persen. Persentase penduduk

perempuan yang buta huruf (2,54 persen) lebih besar daripada penduduk laki-laki (0,56 persen). Memang agak sulit untuk program pemberantasan buta huruf terhadap penduduk yang sudah berumur, diperlukan kesadaran dan peran aktif dari yang bersangkutan untuk mengikuti program ke aksaraan fungsional yang terus dikembangkan pemerintah.

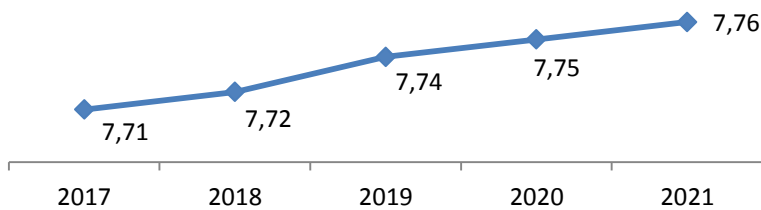
4.2 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (*Means Year School/ MYS*) adalah rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalannya. Adanya perubahan metode penghitungan IPM, maka rata-rata lama sekolah dihitung dari penduduk usia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan.

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas pada tahun 2021 sebesar 7,76 tahun atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (7,75 tahun). Hal ini berarti bahwa rata-

rata penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 1 SLTP atau putus sekolah dikelas 2 SLTP. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah, untuk mewujudkan program wajib belajar 9 tahun bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Grafik 4.1. Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2021



Sumber : IPM Metode Baru, BPS Kab. HSS

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas pada tahun 2021 sebesar 7,76 tahun atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (7,75 tahun). Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 1 SLTP atau putus sekolah dikelas 2 SLTP. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah, untuk mewujudkan program wajib belajar 9 tahun bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4.3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran penting yang dapat mencerminkan keberhasilan suatu pembangunan dalam pendidikan yang juga dapat menjadikan gambaran tentang kualitas suatu masyarakat. Semakin tinggi persentase penduduk yang berpendidikan tinggi memperbesar peluang semakin baik kualitas sumber daya manusianya.

Tabel 4.2. Persentase Penduduk 15 Tahun Ke atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2021

Tingkat Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Laki-Laki + Perempuan	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tdk punya ijazah SD	18,90	14,31	23,77	22,73	21,35	18,58
SD/ Sederajat	32,91	41,41	31,59	34,84	32,25	38,08
SMP/ Sederajat	19,60	17,04	16,57	18,32	18,07	17,69
SMA/ Sederajat	21,79	21,17	17,98	16,03	19,87	18,56
Perguruan Tinggi	6,80	6,07	10,09	8,08	8,46	7,09
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Diolah dari Susenas 2020, BPS Kab. HSS

Tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada

tahun 2021 dapat kita lihat pada tabel 4.2. Dari tabel tersebut terlihat bahwa baru 43,34 persen yang pernah menamatkan jenjang pendidikan SLTP. Jika dibandingkan tahun 2020, persentase penduduk 15 tahun yang menamatkan jenjang SMP mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021. Rata-rata penduduk kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenyam pendidikan hanya sampai tingkat SD, hal ini terlihat dari banyaknya penduduk yang tidak punya ijazah SD sebesar 18,58 persen dan hanya tamat SD/Sederajat yaitu sebesar 38,08 persen. Hal ini perlu perhatian yang serius dari pemerintah agar dimasa yang akan datang pembangunan pendidikan dapat semakin ditingkatkan.

4.4. Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah berharap agar kedua indikator selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan

pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 terlihat paling besar pada penduduk kelompok umur 7–12 tahun yaitu sebesar 99,47 persen, artinya terdapat 99,47 persen penduduk usia 7–12 tahun yang masih bersekolah di SD maupun di SLTP. Tingginya APS untuk usia 7–12 tahun kemungkinan karena gencarnya kampanye program pendidikan dasar yang dilakukan pemerintah di berbagai daerah secara luas dengan disertai oleh bermacam kucuran dana bantuan pendidikan, mulai dari yang hanya terbatas pada kelompok masyarakat miskin hingga yang sifatnya menyeluruh seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Akan tetapi semakin tinggi usia, APS-nya semakin mengecil. Angka Partisipasi Sekolah masing-masing kelompok usia 13-15 tahun besarnya 91,98 persen dan kelompok usia 16–18 tahun sebesar 69,62 persen. Fenomena ini layak menjadi perhatian pemerintah karena sudah merupakan masalah yang cukup serius.

Berdasarkan Tabel 4.3, pada tahun 2021 APS semua kelompok umur mengalami sedikit penurunan dibandingkan

tahun 2020. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2021 secara umum APS perempuan lebih tinggi dari APS laki-laki untuk semua kelompok umur, hanya pada kelompok umur 7-12 tahun yang tidak terlalu jauh perbedaannya.

Tabel 4.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Non Formal Penduduk Berumur 7 – 18 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2021

Jenis Kelamin	Kelompok Umur	APS			
		2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-Laki	7 – 12	100,00	98,53	99,99	99,04
	13 - 15	88,35	87,44	93,15	90,09
	16 - 18	66,34	60,39	74,42	59,92
Perempuan	7 - 12	98,50	98,80	99,98	99,98
	13 - 15	92,55	96,33	91,78	94,02
	16 - 18	75,29	79,36	65,54	78,10
Laki-Laki + Perempuan	7 - 12	99,27	98,67	99,99	99,47
	13 - 15	90,65	91,74	92,41	91,98
	16 - 18	69,87	69,76	69,93	69,62

Sumber : Diolah dari Susenas 2018-2021, BPS Kab. HSS

Selain Angka Partisipasi Sekolah, indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Murni menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat waktu pada jenjang yang sesuai dengan usianya. APM dibagi menjadi

tiga yaitu APM SD, APM SLTP, dan APM SLTA. dengan kelompok umur yang sesuai untuk masing-masing jenjang adalah 7–12 tahun untuk SD, 13 –15 tahun untuk SLTP dan 16–18 tahun untuk SLTA.

Tabel 4.4. Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Nor Formal Penduduk Berumur 7 – 18 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2021

Jenis Kelamin	KELOMPOK UMUR	APM			
		2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-Laki	SD [7-12]	97,44	98,53	98,32	96,70
	SLTP [13-15]	72,21	68,90	69,63	74,03
	SLTA [16-18]	55,70	56,50	62,52	51,49
Perempuan	SD [7-12]	98,50	97,85	99,23	99,98
	SLTP [13-15]	75,48	80,84	79,12	74,74
	SLTA [16-18]	68,24	64,16	59,73	67,76
Laki-Laki + Perempuan	SD [7-12]	97,96	98,19	98,75	98,20
	SLTP [13-15]	74,00	74,68	74,74	74,38
	SLTA [16-18]	60,64	60,28	61,11	60,17

Sumber : Diolah dari Susenas 2018-2021, BPS Kab. HSS

Angka Partisipasi Murni (APM) selalu lebih kecil dari APS, baik pada jenjang pendidikan SD, SLTP, maupun SLTA. Ini menunjukkan masih banyak penduduk yang bersekolah pada jenjang yang tidak sesuai dengan umurnya.

Pada Tabel 4.4. terlihat bahwa APM laki-laki lebih kecil dari APM penduduk perempuan untuk jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA pada tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa hampir pada jenjang pendidikan lebih banyak penduduk perempuan yang bersekolah tepat waktu daripada penduduk laki-laki. Pada tahun 2021 secara umum terjadi sedikit penurunan pada Angka Partipasi Murni (APM) pada semua jenjang pendidikan baik SD, SLTP dan SLTA dibandingkan tahun 2020.

Seperti halnya APS, angka partisipasi murni (APM) juga cenderung mengalami penurunan untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Pada APM usia anak sekolah di setiap jenjang pendidikan sangat diperhatikan. Hal ini dimaksudkan untuk mengungkapkan banyaknya anak yang sekolah di luar sistem pendidikan, seperti menunda saat mulai bersekolah, murid tidak naik kelas, berhenti/keluar dari sekolah untuk sementara waktu dan lulus lebih awal.

BAB V

KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesainya masa hubungan kerja. Tenaga kerja adalah objek atau setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, untuk kebutuhan sendiri dan orang lain. Jumlah angkatan kerja yang besar merupakan potensi untuk aktivitas kegiatan ekonomi jika di barengi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai baik dari segi pendidikan, keahlian maupun keterampilan. Dengan demikian masyarakat akan menikmati kesejahteraan sebagai manfaat langsung dari pembangunan.

Upaya pembangunan banyak diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan, misalnya skala prioritas arah pertumbuhan antara sektor informal dan formal di perkotaan. Akhir-akhir ini di sektor informal di perkotaan semakin berperan penting dalam menyerap pertumbuhan angkatan kerja, maka menjadi kurang bijaksana jika kebijakan

pembangunan perkotaan lebih diarahkan pada sektor formal.

Program-program pembangunan sektoral maupun regional perlu diusahakan demi terciptanya perluasan kesempatan kerja sebanyak mungkin dengan imbalan jasa yang sepadan. Dengan perluasan dan pemerataan lapangan kerja serta peningkatan mutu lapangan pekerjaan diharapkan akan dapat dikurangi perbedaan penghasilan diantara tenaga kerja yang berpenghasilan tinggi dan rendah, sehingga dengan demikian dapat ditingkatkan pemerataan pendapatan.

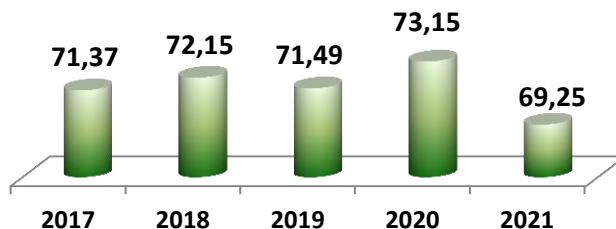
Sakernas sebagai sumber data ketenagakerjaan diselenggarakan 2 kali dalam setahun yaitu bulan Februari (semesteran) dan bulan Agustus (tahunan). Untuk tingkat kabupaten bersumber dari Sakernas Tahunan (Agustus). Data ketenagakerjaan pada bab ketenagakerjaan ini kami menyajikan data mulai tahun 2017 sampai 2021.

5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Indikator ini menggambarkan besarnya

keterlibatan penduduk secara aktif dalam kegiatan ekonomi. Penduduk usia kerja terbagi menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, atau yang sedang mencari pekerjaan. Sedangkan penduduk yang tidak terlibat dalam pasar kerja, termasuk penduduk yang masih sekolah, mengurus rumahtangga, dan lainnya yang tidak tercakup dalam angkatan kerja merupakan bukan angkatan kerja.

Grafik 5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2021



Sumber : Diolah dari Sakernas 2017-2021, BPS Kab. HSS

Catatan : TPAK 2018-2019, terjadi perubahan angka karena penimbang

TPAK Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama Tahun 2016-2021 berada pada kisaran 69-73 persen. Pada tahun 2021, TPAK penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sekitar 69,25 persen. Angka TPAK ini mengalami penurunan dibandingkan TPAK tahun 2020 yang sebesar 73,15 persen.

Salah satu yang menyebabkan penurunan TPAK tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 diantaranya untuk rumah tangga yang usahanya pertanian pada bulan juli dan agustus 2021 sebagian besar kecamatan selain daerah Daha sudah selesai masa panen dan di daerah daha masih belum bisa melaksanakan aktivitas pertanian karena sebagian lahan pertanian masih terendam air (air masih dalam) sehingga tidak melaksanakan aktivitas pertanian. Terutama yang anggota rumah tangga (isteri/ anak KRT) yang membantu aktivitas pertanian Kepala Rumah Tangga (KRT) pada saat kegiatan pertanian tidak dilakukan (tidak bekerja) dianggap sebagai bukan angkatan kerja. Sebagian besar penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan bekerja di lapangan usaha pertanian.

Distribusi angkatan kerja penduduk laki-laki dan perempuan menurut kelompok umur menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Pada Tabel 5.1 dapat dilihat seluruh kelompok umur persentase angkatan kerja laki-laki selalu lebih besar dibandingkan persentase angkatan kerja perempuan, bahkan ada beberapa kelompok umur yang persentase angkatan kerja perempuan hampir setengah angkatan kerja laki-laki. Hal ini diantaranya disebabkan oleh faktor budaya dan ekonomi yang menempatkan penduduk

laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan anggota rumah tangga yang wajib mencari nafkah sehingga penduduk laki-laki banyak sebagai angkatan kerja. Dilihat pada masing-masing kelompok umur persentase terbesar angkatan kerja baik laki-laki atau perempuan berada pada kelompok umur 35-39 tahun sampai kelompok umur 50-54 tahun.

Tabel 5.1. Distribusi Persentase Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021

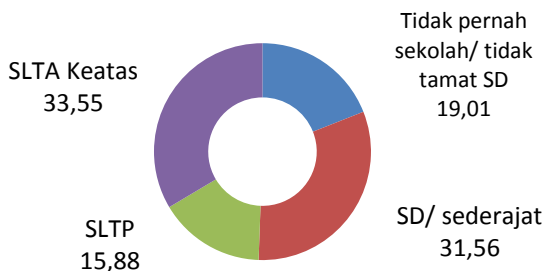
Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		L+P
	Laki-laki	Perempuan	
15-19	4,11	2,46	3,82
20-24	7,11	3,87	5,46
25-29	8,01	5,46	6,71
30-34	8,39	5,21	6,78
35-39	9,02	6,27	7,63
40-44	9,14	6,86	7,98
45-49	9,24	7,57	8,40
50-54	8,14	7,70	7,92
55-59	7,16	5,48	6,31
60-64	5,79	2,66	4,20
65+	4,90	4,27	4,58
Jumlah	81,02	57,82	69,25

Sumber : Diolah dari Sakernas 2021, BPS Kab. HSS

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah dapat ditinjau dari sisi tingkat pendidikan penduduk yang bekerja. Angkatan kerja

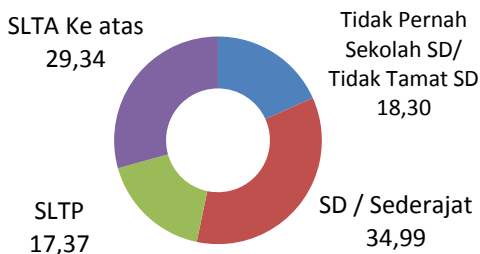
di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD kebawah yaitu sekitar 50,57 persen dari total angkatan kerja, bahkan angkatan kerja yang berpendidikan tidak tamat SD mencapai 19,01 persen. Sementara angkatan kerja yang berpendidikan SLTA ke atas hanya 33,55 persen. Tidak berbeda jauh dengan tahun 2021, angkatan kerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2020 juga di dominasi oleh penduduk yang tingkat pendidikan penduduknya SD kebawah. Hal ini mencerminkan kualitas tenaga kerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih rendah. Perlu perhatian serius dari pemerintah daerah agar ke depannya kualitas angkatan kerja Kabupaten Hulu Sungai Selatan meningkat.

Grafik 5.2. Persentase Penduduk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021



Sumber : Diolah dari Sakernas 2021, BPS Kab. HSS

Grafik 5.3. Persentase Penduduk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020

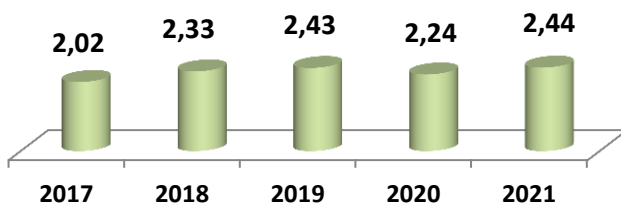


Sumber : Diolah dari Sakernas 2020, BPS Kab. HSS

Selain itu ada indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pengangguran terbuka dikalangan angkatan kerja yaitu TPT (Tingkat pengangguran terbuka). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan penduduk angkatan kerja. TPT Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021 adalah 2,44 persen, yang artinya dari 100 orang angkatan kerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang termasuk kategori pengangguran ada sekitar 2 sampai 3 orang. Indikator ini mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,20 persen dibandingkan tahun 2020 (2,24 persen). Salah satu yang menyebabkan kenaikan TPT tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 diantaranya meningkatnya penduduk terutama yang usia

produktif melakukan aktivitas mencari informasi lowongan pekerjaan terkait lowongan pekerjaan seperti CPNS, karyawan perusahaan, pekerja kontrak atau honorer. Penerimaan CPNS dan P3K pada tahun 2021 lebih banyak dibanding tahun 2020. Pada tahun 2021 pemerintah pusat dan pemerintah daerah banyak membuka lowongan kerja CPNS dan P3K dibandingkan tahun 2020.

Grafik 5.4. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2021

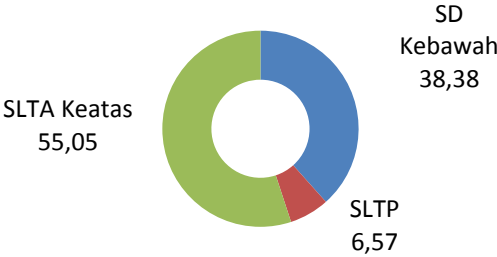


Sumber : Diolah dari Sakernas 2017-2021, BPS Kab. HSS

Catatan : TPAK 2018-2019, terjadi perubahan angka karena penimbang

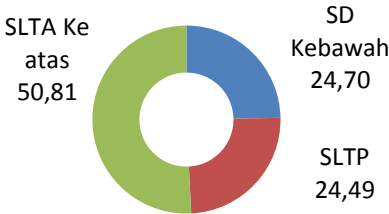
Pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan, tetapi mencari pekerjaan; mereka yang tak punya pekerjaan, tetapi mempersiapkan usaha; mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Grafik 5.5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang Statusnya Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021



Sumber : Diolah dari Sakernas 2021, BPS Kab. HSS

Grafik 5.6. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang Statusnya Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020



Sumber : Diolah dari Sakernas 2020, BPS Kab. HSS

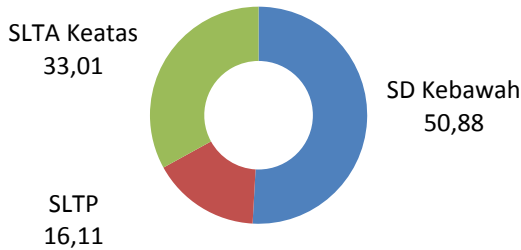
Fenomena ketenagakerjaan tidak hanya dilihat dari tingkat pengangguran terbuka saja, akan tetapi dapat dilihat dari tingkat pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan seperti terlihat pada Grafik 5.4 memberikan gambaran mengenai tenaga kerja yang tersedia tidak terserap berdasarkan

tingkat keahlian atau pendidikan mereka. Pada tahun 2021 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tertinggi pada tingkat pendidikan SLTA keatas yaitu persentase sebesar 50,81 persen, sementara yang terendah justru pada kelompok penduduk SLTP dan SD ke bawah yaitu masing-masing sebesar 24,49 persen dan 24,70 persen, angka ini tidak berbeda jauh dengan tahun 2020. Hal ini dapat memberikan informasi bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang tinggi justru berada pada resiko yang lebih tinggi untuk menjadi pengangguran.

5.2. Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan, Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

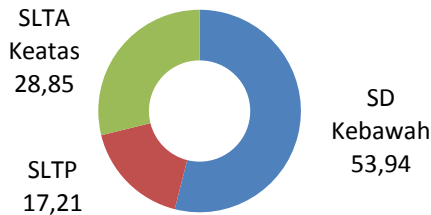
Kemampuan sumber daya manusia untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi adalah salah satu faktor penting dalam pembangunan. Penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang unggul perlu direncanakan untuk masa mendatang, sedangkan bagi para tenaga kerja yang sudah terlanjur masuk ke dunia kerja perlu mendapat bimbingan dan pelatihan peningkatan teknis dan kemampuan yang memadai agar dapat bersaing dalam pasar kerja khususnya bagi tenaga kerja yang berusia muda.

Grafik 5.7. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021



Sumber : Diolah dari Sakernas 2021, BPS Kab. HSS

Grafik 5.8. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020



Sumber : Diolah dari Sakernas 2020, BPS Kab. HSS

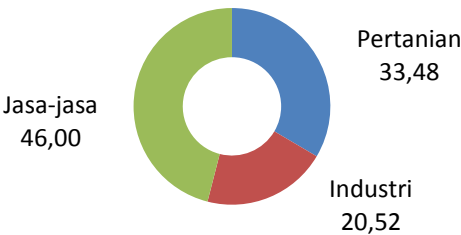
Ditinjau dari kriteria tingkat pendidikan tertinggi (Grafik 5.6), dari semua penduduk yang bekerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021 didominasi oleh mereka yang

berijazah SD ke bawah yang mencapai 50,88 persen. Artinya sekitar 50 sampai 51 orang dari 100 orang penduduk bekerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah. Hal yang sama juga terjadi pada tahun sebelumnya (tahun 2020). Kondisi tersebut cukup memprihatinkan mengingat persaingan pasar kerja yang dihadapi di masa sekarang dan mendatang, dimana kebutuhan tenaga kerja membutuhkan peningkatan level pendidikan. Oleh sebab itu para tenaga kerja dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan sulit bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari luar, terutama kebutuhan tenaga kerja yang berhubungan dengan teknologi

Sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berdasarkan Sakernas tahun 2021, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 33,48 persen dari jumlah seluruh penduduk yang bekerja. Selanjutnya sektor terbesar setelah sektor pertanian adalah sektor jasa-jasa (46 persen) dan sektor industri (20,52 persen). Sektor jasa-jasa walaupun besar persentasenya tetapi merupakan gabungan beberapa lapangan usaha (jasa kesehatan, jasa pendidikan, perdagangan, transportasi, infokom dll). Jika dibandingkan tahun

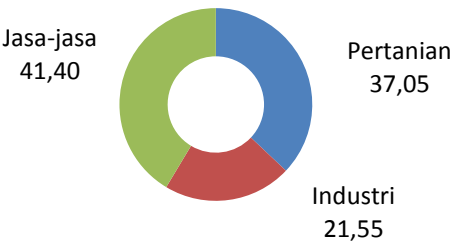
sebelumnya (tahun 2020), sektor pertanian masih menjadi sektor yang paling banyak diusahakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Grafik 5.9. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021



Sumber : Diolah dari Sakernas 2021, BPS Kab. HSS

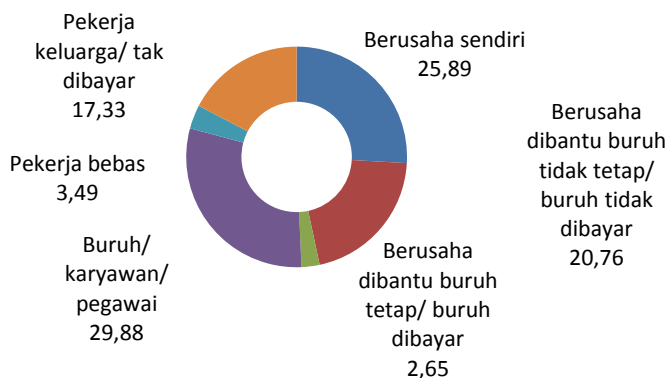
Grafik 5.10. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020



Sumber : Diolah dari Sakernas 2020, BPS Kab. HSS

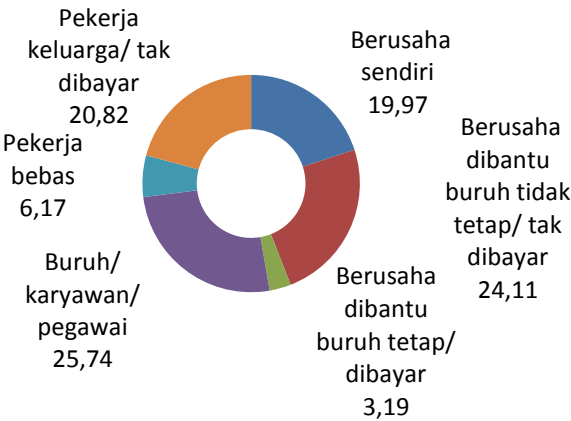
Pada tahun 2021, penduduk yang bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai memiliki persentase paling tinggi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebesar 29,88 persen. Sementara penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap/dibayar memiliki persentase paling rendah, sebesar 2,65 persen (Grafik 5.10). Hal yang perlu diperhatikan adalah masih tingginya penduduk bekerja dengan status sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar. Karena hampir 20 persen dari jumlah penduduk yang bekerja (17,33 persen) adalah mereka yang bekerja tetapi hanya membantu untuk mendapatkan penghasilan. Artinya mereka memiliki aktifitas bekerja namun tidak mendapatkan kompensasi (balas jasa/upah) secara langsung atas pekerjaan mereka.

Grafik 5.11. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021



Sumber : Diolah dari Sakernas 2021, BPS Kab. HSS

Grafik 5.12. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020

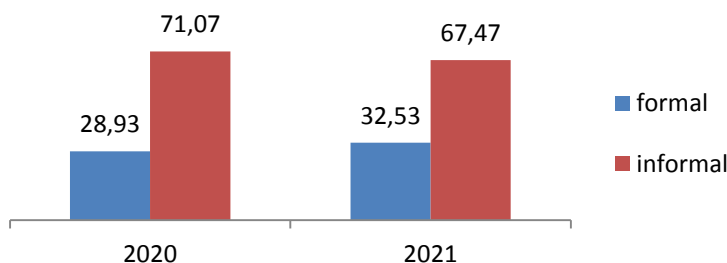


Sumber : Diolah dari Sakernas 2020, BPS Kab. HSS

Sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Mengingat keterbatasan variabel penentuan sektor informal yang belum dapat diterapkan sepenuhnya dalam Sakernas, maka dari itu, dalam publikasi ini digunakan pendekatan dengan identifikasi terbatas pada pekerja di kegiatan informal. Secara sederhana kegiatan

formal dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan utama. Penduduk bekerja di kegiatan formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya termasuk penduduk bekerja di sektor informal.

Grafik 5.13. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama formal atau informal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2021



Sumber : Diolah dari Sakernas 2020-2021, BPS Kab. HSS

Grafik 5.8 menunjukkan pada tahun 2020 dan tahun 2021 sektor informal menjadi sektor yang paling besar dalam menyerap tenaga kerja. Sektor informal mampu menyerap 50 persen lebih penduduk bekerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada tahun 2021 pekerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekitar 67,47 persen bekerja di sektor informal. Sedangkan persentase pekerja di sektor formal sebesar 32,53

persen. Jika dibandingkan tahun sebelumnya 2020 terjadi penurunan pekerja pada sektor informal pada tahun 2021.

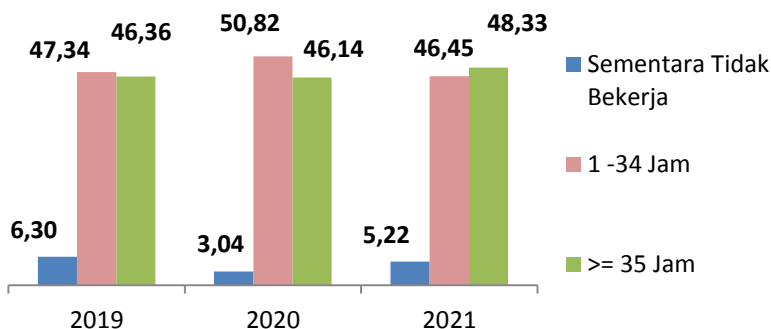
5.3. Jumlah Jam Kerja

Terkait dengan jumlah jam kerja yang dihabiskan selama seminggu, seorang pekerja dapat dikategorikan sebagai pengangguran kentara atau terselubung dimana mereka bekerja jauh di bawah jam kerja rata-rata selama seminggu (kurang dari 35 jam). Biasanya pekerja semacam ini memiliki pendapatan di bawah kemampuan sebenarnya. Selain itu seseorang yang terpaksa bekerja di bawah 35 jam merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian atau keterampilannya. Untuk pekerja yang statusnya berusaha/buruh/karyawan dianggap sementara tidak bekerja maksimal 3 bulan tidak bekerja.

Grafik 5.13. menunjukkan bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan penduduk bekerja pada tahun 2021 dengan jumlah jam kerja lebih dari 35 jam selama seminggu sebesar 48,33 persen. Indikator ini tidak berbeda jauh dibandingkan tahun 2020 sebesar 46,14 persen. Selebihnya sebesar 46,45 persen adalah penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam

seminggu dan 5,22 persen mereka yang sementara tidak bekerja saat pendataan dilaksanakan pada tahun 2021.

Grafik 5.14. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Jam Kerja seluruhnya Selama Seminggu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2021



Sumber : Diolah dari Sakernas 2019-2021, BPS Kab. HSS

Pekerja tidak penuh adalah mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Pekerja tidak penuh terdiri dari :

- Setengah menganggur : mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (terpaksa)
- Pekerja paruh waktu : mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam

seminggu) tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (setengah pengangguran sukarela)

Tabel 5.2 Persentase Pengangguran, setengah Pengangguran, Pekerja Paruh waktu dan Pekerja Penuh Waktu Terhadap Jumlah Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2021

Uraian	Jenis Kelamin					
	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki + Perempuan	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)		(3)		(4)	
-Pengangguran	2,58	3,39	1,78	1,16	2,24	2,44
- Setengah Pengangguran	10,70	6,92	9,05	5,36	9,99	6,25
- Pekerja Paruh Waktu	30,92	30,17	51,35	51,15	39,69	39,06
- Pekerja Penuh Waktu	55,80	59,52	37,82	42,33	48,08	52,25
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Prov Kal-Sel, Agustus 2020-2021

Pada Tabel 5.2 menggambarkan bahwa hampir 40 persen (39,06 persen) penduduk angkatan kerja berstatus sebagai pekerja paruh waktu dan 6,25 persen berstatus sebagai setengah pengangguran. Jika dibandingkan tahun sebelumnya tidak terlalu berbeda jauh. Hal demikian harus menjadi

perhatian pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya terutama lapangan kerja yang bisa menjadi pegangan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih layak.

BAB VI

POLA KONSUMSI DAN KEMISKINAN

6.1 Pola Konsumsi

Pada masa pandemi COVID-19 ternyata mengakibatkan pola konsumsi masyarakat berubah. Masyarakat lebih senang memasak dan makan di rumah karena ada mandat *stay at home*, *social distancing*, PSBB dll, sehingga muncul *e-commerce* yang menjadi andalan artinya pola konsumsi mengalami perubahan dari ritel dan gerai *offline* ke *online*. Faktor utama yang mendorong keputusan belanja konsumen yaitu ketersediaan produk, fungsi produk & *delivery* (kecepatan dan kenyamanan). Pola pengeluaran/konsumsi penduduk merupakan informasi untuk melihat kesejahteraan penduduk. Besarnya nilai nominal (rupiah) yang dibelanjakan baik dalam bentuk makanan maupun non makanan, secara tidak langsung dapat mencerminkan kemampuan ekonomi rumah tangga, untuk mencukupi kebutuhan yang mencakup barang dan jasa.

Secara umum konsumsi/pengeluaran rumah tangga

terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu konsumsi/pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Dengan kedua jenis pengeluaran tersebut, dapat dilihat bagaimana pola konsumsi masyarakat. Tingkat kebutuhan/permintaan (*demand*) terhadap kedua kelompok pengeluaran tersebut pada dasarnya berbeda. Dalam kondisi pendapatan terbatas akan mendahulukan pemenuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan maka semakin lama akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan.

Pergeseran komposisi atau pola pengeluaran tersebut terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sementara elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini semakin jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi

kebutuhan barang bukan makanan (kalau bukan disimpan/ditabung atau diinvestasikan kembali).

Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk, dan perubahan komposisinya sebagai indikasi perubahan tingkat kesejahteraan. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari pengeluaran rumah tangga. Sebaliknya di negara-negara maju, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa, merupakan bagian terbesar dari pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran tersebut tidak bersifat primer lagi, antara lain pengeluaran untuk perawatan kesehatan, perawatan kecantikan, peningkatan pendidikan, rekreasi, olah raga dan sebagainya.

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2021

Golongan Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan (RP)	Persentase		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
< 1.000.000	3,24	3,24	0,96
1.000.000 - 1.999.999	16,45	16,45	18,77
2.000.000 - 2.999.999	31,50	31,50	26,43
>= 3.000.000	48,82	48,82	53,84
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Diolah dari Susenas 2019-2021, BPS Kab. HSS

Dari Hasil Susenas 2021, rata-rata pengeluaran rumah tangga sebulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada pada kelompok pengeluaran lebih dari Rp.3.000.000,- sebanyak 53,84 persen dan kelompok pengeluaran Rp. 2.000.000,- s.d Rp 2.999.999,- sebanyak 26,43 persen. Sementara untuk pengeluaran perkapita per bulan, persentase terbesar pada kelompok pengeluaran Rp.1.000.000,- ke atas sebesar 46,01 persen dan kelompok pengeluaran Rp. 500.000 s.d Rp. 749.000,- sebesar 27,50 persen. Persentase rumah tangga golongan pengeluaran Rp. 3.000.000,- ke atas per bulan pada tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020 dan mencapai lebih dari separuh rumah tangga di Kbuapten Hulu Sungai Selatan. Akan tetapi pada tahun 2021 untuk persentase pengeluaran perkapita golongan pengeluaran Rp. 1.000.000,- ke atas per bulan per kapita sebesar 46,01 persen di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jika dibanding tahun sebelumnya persentasenya mengalami penurunan. Hal ini mencerminkan untuk penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum sampai separuh total penduduk yang pengeluarannya di atas Rp. 1.000.000,-. Diharapkan kedepannya kesejahteraan penduduk Kabupaten Hulu Sungai

Selatan terus meningkat.

Tabel 6.2. Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita/Bulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2021

Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan (RP)	Persentase		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
< 500.000	12,66	5,89	4,84
500.000 - 749.999	29,44	24,84	27,50
750.000 - 999.999	21,63	19,76	21,65
>= 1.000.000	35,16	49,51	46,01

Sumber : Diolah dari Susenas 2019-2021, BPS Kab. HSS

Berdasarkan Tabel 6.3 di atas terlihat bahwa selama periode 2019-2021 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 sebesar Rp 1.078.698,- mengalami peningkatan pada tahun 2020 mencapai Rp 1.1078.698,- dan tahun 2021 menjadi Rp. 1.115.342,-. Bila dilihat persentasenya pengeluaran untuk non makanan mengalami peningkatan dari 44,29 persen pada tahun 2019 menjadi 45,25 persen pada tahun 2020. Akan tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 44,74 persen dibandingkan tahun 2020. Hal ini menggambarkan bahwa lebih dari separuh pengeluaran penduduk Kabupaten Hulu

Sungai Selatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan.

Tabel 6.3 Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2021

Jenis Pengeluaran	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Perbulan					
	Nominal (Rp)			Persentase (%)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Makanan	537.191	579.848	616.294	55,71	53,75	55,26
Non Makanan	427.102	498.859	499.048	44,29	45,25	44,74
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	204.934	244.644	248.638	21,25	22,67	22,29
Aneka Barang dan Jasa	91.676	114.390	119.758	9,51	10,60	10,74
Pakaian, Alas Kaki, Tutup Kepala	27.127	30.565	29.804	2,81	2,83	2,67
Barang Tahan Lama	55.929	48.427	43.702	5,80	4,49	3,92
Lainnya	47.436	60.824	57.146	4,92	5,64	5,12
Jumlah	964.293	1.078.698	1.115.342	100,00	100,00	100,00

Sumber :Diolah dari Susenas 2019-2021, BPS Kab. HSS

Pada Tabel 6.3, pada tahun 2021 dapat terlihat adanya penurunan persentase pengeluaran pada kelompok bukan makanan terjadi pada hampir semua kelompok pengeluaran non makanan kecuali aneka barang dan jasa. Pengeluaran aneka barang pada tahun 2021 sebesar 10,74 persen

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Sedangkan Pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 22,29 persen dibanding tahun 2020. Penurunan pengeluaran pada tahun 2021 juga terjadi pada pengeluaran untuk lainnya menjadi 5,12 persen seperti pajak, pungutan, asuransi dan keperluan pesta dan upacara dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2020). Selanjutnya pengeluaran pakaian juga mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 2,67 persen. Sedangkan pengeluaran barang tahan lama dilihat dari persentasenya dan nominalnya tahun 2021 juga mengalami penurunan menjadi 3,92 persen (Tabel 6.3).

Tabel 6.4 Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Komoditi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021

Jenis Pengeluaran	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Perbulan	
	Nominal (Rp)	Persentase
(1)	(2)	(3)
MAKANAN		
A. PADIZAN	73.214	6,56
B. UMBI-UMBIAN	2.183	0,20
C. IKAN/UDANG/CUMI	77.801	6,98
D. DAGING	16.997	1,52
E. TELUR & SUSU	33.864	3,04
F. SAYUR-SAYURAN	36.226	3,25

G. KACANG -KACANGAN	8.729	0,78
H. BUAH-BUAHAN	17.608	1,58
I. MINYAK DAN LEMAK	14.240	1,28
J. BAHAN MINUMAN	19.572	1,75
K. BUMBU2AN	12.763	1,14
L. KONSUMSI LAINNYA	15.633	1,40
M. MAKANAN DAN MINUMAN JADI	229.100	20,54
N. TEMBAKAU DAN SIRIH	58.364	5,23
TOTAL	616.294	55,26
NON MAKANAN		
PERUMAHAN DAN FASILITAS RUMAH TANGGA	248.638	22,29
ANEKA BARANG & JASA	119.758	10,74
PAKAIAN, ALAS KAKI, DAN TUTUP KEPALA	29.804	2,67
BARANG TAHAN LAMA DURABLE GOODS	43.702	3,92
PAJAK, PUNGUTAN, DAN ASURANSI	53.693	4,81
KEPERLUAN PESTA DAN UPACARA	3.453	0,31
TOTAL	499.048	44,74

Sumber : Estimasi Susenas 2021, BPS Kab. HSS

6.2 Kemiskinan

Dengan pertimbangan bahwa kemiskinan masih menjadi problem di berbagai negara di dunia ini, maka “penghilangan kemiskinan dan kelaparan” pada 2030 menjadi “tulang punggung” dari tujuan agenda pembangunan berkelanjutan. Kemiskinan yang menjadi tujuan utama MDGs kembali menjadi tujuan utama dalam SDGs. Selain karena kemiskinan dan kelaparan masih sebagai problem dunia, menjadikan penghapusan kemiskinan sebagai tujuan utama diarahkan untuk menjamin keberlanjutan capaian MDGs.

Dalam *Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development* tujuan mengakhiri kemiskinan menjadi tujuan “utama” dari 17 tujuan yang disepakati dalam SDGs. Tujuan pertama dari 17 tujuan SDGs adalah “Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Di Mana Pun” (*End poverty in all its forms everywhere*). Tujuan utama tersebut harus menjadi tema pembangunan, agenda utama dan berkelanjutan yang melatarbelakangi berbagai tujuan pembangunan lainnya seperti infrastruktur, pariwisata, pangan dan energi dan lain-lain.

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang di ukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi pada setiap negara, termasuk Indonesia. Angka kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia menunjukkan program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Hal ini disebabkan beberapa kebijakan yang sebenarnya ditujukan untuk menekan angka kemiskinan,

justro berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar yang diukur dari tingkat konsumsi atau pengeluaran ada 3 ukuran kemiskinan yang digunakan yaitu, :

- *Head Count Index* (HCI- P_0) yaitu persentase penduduk dibawah garis kemiskinan (GK)
- Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) yang merupakan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh

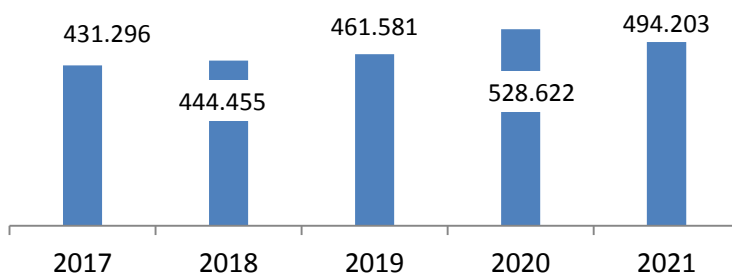
rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

- Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index- P_2*) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan di antara penduduk miskin.

Penghitungan penduduk miskin tidak terlepas dari garis kemiskinan yang ditetapkan. Garis kemiskinan yang digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan dibawah garis kemiskinan. Pada tahun 2021, garis kemiskinan perkapita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp. 494.203,-. Hal ini berarti bahwa penduduk yang pengeluaran untuk konsumsinya perbulan kurang dari Rp. 494.203,-. dapat dikatakan sebagai penduduk miskin. Besaran garis kemiskinan tahun 2021 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Salah satu yang menyebabkan penurunan garis kemiskinan di kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021 diantaranya pada masa pandemi covid 19 yang berlangsung, pemerintah memberlakukan *Social*

distancing dan penerapan protocol kesehatan, sebagian besar masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sebelum pandemi covid 19 mengkonsumsi makanan di rumah makan / warung makan dibandingkan memasak sendiri makanan di rumah. Akan tetapi pada saat pandemi covid 19 tahun 2021 masyarakat lebih banyak memasak makanan sendiri. Hal tersebut menyebabkan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk pengeluaran uang untuk makanannya lebih hemat tanpa mengurangi kalornya. Yang biasanya kalau sekali makan di rumah makan/ warung makan bisa menghabiskan uang sampai 50 ribu rupiah, akan tetapi karena memasak sendiri di rumah uang 50 ribu rupiah itu bisa untuk makan 3 kali.

Grafik 6.1. Garis Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2021

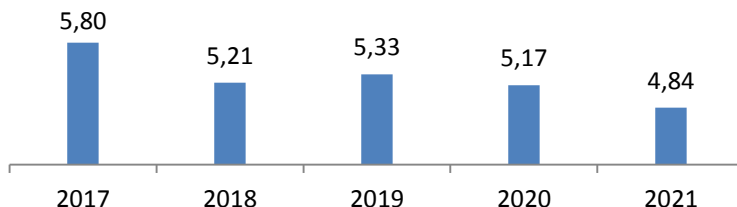


Sumber : Diolah dari Susenas 2017-2021, BPS Kab. HSS

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita perbulan lebih kecil dari garis kemiskinan. Penduduk miskin Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 menjadi 11,47 ribu orang atau sekitar 4,84 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam 5 tahun terakhir (2017-2021), penduduk miskin Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021 dibanding tahun 2017 terjadi penurunan yang sangat besar dari 5,8 persen (13.447 orang) menjadi 4,84 persen (11.466 orang).

Dalam 5 tahun terakhir, jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2017 untuk persentase penduduk miskin terbesar ke 4 se Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan terus berkurangnya penduduk miskin selama 5 tahun terakhir, pada tahun 2021 ini posisi Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbesar ke 8 se Provinsi Kalimantan Selatan untuk persentase penduduk miskin terbesar. Diharapkan tren penurunan penduduk kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini terus berlanjut, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan oleh seluruh penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

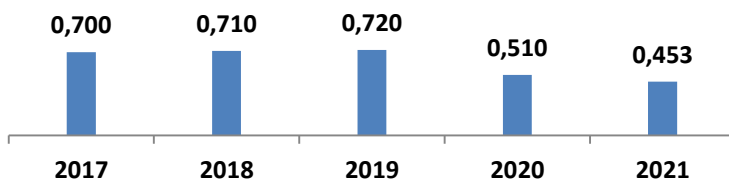
Grafik 6.2. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2021 (%)



Sumber : Diolah dari Susenas 2017-2021, BPS Kab. HSS

Berkurangnya penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan di dukung dengan banyaknya realisasi program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Program Rumah Sejahtera (Bedah Rumah), Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Program Subsidi Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin/Ranstra), dan program-program pendukung penanggulangan Kemiskinan lainnya.

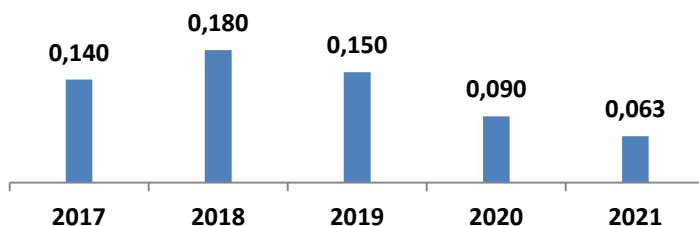
Grafik 6.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2021



Sumber : Diolah dari Susenas 2017-2021, BPS Kab. HSS

Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Pada tahun 2021, indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,453. Perubahan angka indeks ini cukup fluktuatif. Jika dibandingkan tahun 2021 angka ini mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 0,453 persen. jika dibandingkan pada tahun 2017, dalam kurun waktu 5 tahun, terjadi penurunan angka indeks kedalaman kemiskinan dari 0,700 menjadi 0,453. Nilai P_1 yang semakin rendah menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Diharapkan dengan nilai P_1 yang semakin kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin.

Grafik 6.4 Indeks Keparahkan Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2021



Sumber : Diolah dari Susenas 2017-2021, BPS Kab. HSS

Indeks keparahan kemiskinan (P_2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami penurunan pada tahun 2021 (0,063) dibandingkan tahun 2020 (0,090). Jika dibandingkan tahun 2017 (0,140) maka dalam 5 tahun terakhir terjadi penurunan indeks keparahan menjadi 0,063. Hal ini menggambarkan berkurangnya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam 5 tahun terakhir.

6.3 Distribusi Pendapatan

Peningkatan kesejahteraan penduduk yang dilihat dari peningkatan pendapatan idealnya di ikuti dengan pemerataan pendapatan. Pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan diantara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan

menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

Salah satu indikator untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan penduduk adalah gini ratio. Indeks gini adalah ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol sampai 1. Apabila koefisien gini bernilai nol berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna, dimana satu orang menguasai semuanya dan yang lainnya nihil). Koefisien gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva *Lorenz* dibagi dengan luas separuh bidang dimana kurva *Lorenz* berada.

Secara umum angka Gini Ratio dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

$0 < \text{Gini Ratio} \leq 0,35$ -----→ketimpangan rendah

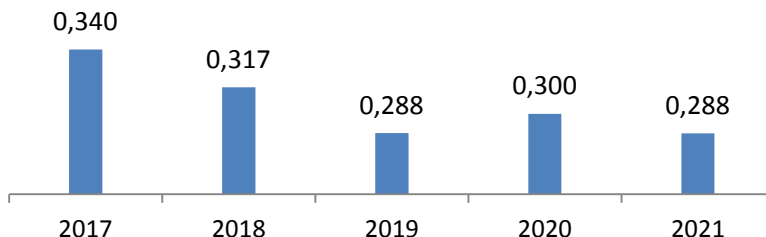
$0,35 < \text{Gini Ratio} \leq 0,50$ -----→ketimpangan sedang

$\text{Gini Ratio} > 0,50$ -----→ketimpangan tinggi

Nilai dari indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya mendekati 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi. Jika rasio lebih dari 0,5, maka terjadi ketimpangan yang cukup tajam dan serius. Olah data Susenas menunjukkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021 gini rasionya sebesar 0,288. Hal ini berarti bahwa distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan relatif merata. Besaran Indeks Gini Ratio relatif mengalami penurunan pada tahun 2021 (0,288) dibandingkan tahun 2020 (0,300) dan dalam 5 tahun terakhir gini ratio Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 (0,340). Hal ini menggambarkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan makin menurun dalam 5 tahun terakhir dan berada pada kategori ketimpangan rendah. Penurunan gini ratio Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021 ini sejalan dengan penurunan jumlah penduduk miskin, penurunan indeks kedalaman kemiskinan dan penurunan indeks keparahan

kemiskinan. Diharapkan kedepannya tren penurunan kemiskinan dan gini ratio ini terus berlanjut.

**Grafik 6.5. Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2017-2021**



Sumber : Diolah dari Susenas 2017-2021, BPS Kab. HSS

Selain gini ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen teebawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya dibawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya di atas 17 persen. Pada tahun 2021 ini untuk persentase pengeluaran penduduk 40 persen terbawah, datanya belum tersedia.

BAB VII

PERUMAHAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI

Secara fisik perumahan merupakan sebuah lingkungan yang terdiri dari kumpulan unit-unit rumah tinggal dimana dimungkinkan terjadinya interaksi sosial diantara penghuninya, serta dilengkapi prasarana sosial, ekonomi, budaya, dan pelayanan yang merupakan subsistem dari kota secara keseluruhan. Lingkungan ini biasanya mempunyai aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan serta sistem nilai yang berlaku bagi warganya

Sekelompok penduduk yang membangun rumah pada suatu wilayah akan membentuk lingkungan baru berupa kelompok pemukiman penduduk. Biasanya suatu komunitas penduduk yang mendiami suatu wilayah menuai berbagai masalah sebagai konsekuensi terciptanya suatu peradaban. Konsekuensi tersebut berupa masalah-masalah sosial budaya dan kependudukan seperti masalah kesehatan, sanitasi, maupun hubungan antar masyarakat.

Kebutuhan akan perumahan kian bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, terlebih di daerah-daerah perkotaan. Permasalahan yang akhirnya timbul bukan hanya bagaimana membangun perumahan penduduk, tapi juga bagaimana menyediakan lokasi pemukiman dan fasilitas sosial serta fasilitas lainnya yang tertata secara rapi agar tidak menimbulkan masalah sosial di kemudian hari.

Dampak lain yang ditimbulkan oleh pembangunan perumahan yang semakin pesat adalah bergesernya penggunaan lahan yang semula digunakan sebagai lahan pertanian secara perlahan-lahan berkurang karena pemanfaatannya dialihkan menjadi daerah pemukiman, sehingga akan berdampak negatif pada produksi hasil pertanian. Di samping itu juga akan timbul masalah lingkungan alam seperti pencemaran tanah dan air.

Untuk meminimalkan dampak negatif yang timbul akibat pembangunan perumahan, sangat diperlukan peran pemerintah dalam mengatur tata guna lahan agar tercipta keseimbangan antara pemanfaatan dan daya dukung lingkungan yang tersedia. Perumahan dan fasilitas tempat tinggal merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan. Unsur-unsur rumah yang

sering menjadi indikator perumahan adalah kualitas dan fasilitas bangunan.

7.1. Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, rumah dinas atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Tabel 7.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2021

Status Kepemilikan Rumah Tinggal	Persentase		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Milik sendiri	80,92	83,72	83,38
Kontrak / Sewa	5,38	0,96	2,91
Bebas sewa	13,43	14,48	13,44
Dinas /Lainnya	0,27	0,84	0,27
Total	100,00	100,00	100,00

***) termasuk rumah lainnya adalah rumah dinas, rumah adat dll**

Sumber : Diolah dari Susenas 2019-2021, BPS Kab. HSS

Berdasarkan Tabel 7.1 terlihat bahwa pada tahun 2019-2021 sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menempati rumah sendiri. Besarnya angka kepemilikan rumah sendiri pada tahun 2021 (83,32 persen) mengindikasikan bahwa pembangunan perumahan secara umum berjalan dengan dinamis seiring dengan penambahan penduduk dan peningkatan tingkat kesejahteraan. Perkembangan sektor perumahan yang dinamis hendaknya turut pula diimbangi dengan keselarasan dampaknya terhadap lingkungan, agar pembangunan rumah dan bangunan tetap ramah terhadap lingkungan.

7.2 Kondisi Fisik Tempat Tinggal

Kondisi bangunan secara kasat mata dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan rumah tangga yang dicerminkan melalui kelayakan rumah sebagai tempat tinggal. Beberapa indikator fisik perumahan yang relevan antara lain luas dan jenis lantai, atap, dan dinding.

Lantai rumah merupakan salah satu sarana berkumpul dan bermain anggota rumah tangga. Lantai yang luas dan

jenisnya yang berkualitas lebih memungkinkan anggota rumah tangga untuk beraktivitas dengan nyaman. Relevansinya dengan kesehatan, lantai menjadi sarana kontak anggota rumah tangga dengan kemungkinan berbagai penyakit. Bahkan jenis lantai ini merupakan salah satu variabel dalam penentuan keluarga sejahtera atau pra sejahtera. Dengan demikian jenis dan luas lantai disamping menggambarkan keadaan sosial ekonomi juga amat vital dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu indikatornya adalah luas lantai per kapita yang merupakan rata-rata luas lantai yang ditempati tiap anggota rumah tangga.

Tabel 7.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Luas Lantai Per Rumah Tangga dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2021

Luas Lantai (m2)	Daerah Tempat Tinggal					
	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Pedesaan	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<=19	2,25	0,79	2,85	3,00	2,67	2,34
20-49	31,62	38,35	44,88	36,01	40,91	36,71
50-99	50,68	46,17	41,15	48,56	44,01	47,84
100-149	10,75	12,01	9,06	8,68	9,56	9,68
>=150	4,70	2,67	2,06	3,75	2,85	3,43
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Diolah dari Susenas 2020-2021, BPS Kab. HSS

Pada Tabel 7.2 berdasarkan hasil Susenas menunjukkan pada tahun 2021 sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kelompok luas lantainya berada pada luas lantai $50 - 99 \text{ m}^2$ dan $20 - 49 \text{ m}^2$. Sedangkan untuk rumah tangga yang luas lantainya kurang dari 20 meter hanya sebesar 2,34 persen.

Rata-rata luas lantai per rumah tangga di kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 adalah $60,87 \text{ m}^2$ dan 2021 adalah $63,62 \text{ m}^2$ dengan rata-rata luas lantai perkapita $23,02 \text{ m}^2$ pada tahun 2020 dan 2021 adalah $23,52 \text{ m}^2$. Bila dibandingkan dengan standar tertentu misalnya menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m^2 (BPS, 2001). Sedangkan menurut SK Menteri Perumahan Rakyat menyatakan luas lantai perkapita yang layak huni adalah lebih dari $7,2 \text{ m}^2$. Standar *American Public Health Association (APHA)* yang telah disesuaikan dengan kondisi Indonesia, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal 10 m^2 . Artinya satu rumah tangga yang terdiri dari 4 orang, idealnya memiliki luas lantai minimal 40 m^2 .

Tabel 7.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Perkapita (Kriteria Rumah Sehat) dan Daerah Tempat Tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2021(%)

Luas Lantai (m2)	Daerah Tempat Tinggal					
	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Pedesaan	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
$\leq 7,2$	5,23	7,10	7,18	7,30	6,60	7,24
< 8	5,42	8,16	8,79	7,69	7,78	7,83
< 10	10,80	18,60	18,44	14,61	16,15	15,81

Sumber : Diolah dari Susenas 2020, BPS Kab. HSS

Berdasarkan Tabel 7.3. dapat dilihat bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021 masih ada penduduk yang menghuni rumah tidak sehat dengan rata-rata luas lantai perkapita $\leq 7,2 \text{ m}^2$ yakni sebesar 7,24 persen. Sedangkan bila yang digunakan syarat rumah sehat Kementerian Kesehatan maka persentase tersebut meningkat menjadi 7,83 persen, dan jika yang digunakan adalah ukuran APHA, maka ada sekitar 15,81 persen penduduk yang menghuni rumah dengan ukuran luas lantai perkapita yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding

terluas bukan bambu, dengan atap terluas bukan ijuk/rumbia dan memiliki lantai terluas bukan tanah.

Pada kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2021, berdasarkan data Susenas 2019 sampai 2021, secara umum persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah yang berlantaikan terluas bukan tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan persentase mendekati 100 persen artinya hampir tidak ada rumah yang luas lantai terluasnya adalah tanah. Adapun bahan yang paling banyak digunakan sebagai lantai terluas adalah kayu/papan sebesar 89,02 persen. Hal ini sesuai dengan kondisi geografis di Kabupaten Hulu Sungai Selatan banyak daerah rawa.

Selain jenis lantai, indikator lain yang berhubungan dengan kualitas tempat tinggal adalah atap dan dinding terluas yang digunakan serta rata-rata luas lantai perkapita. Berdasarkan Tabel 7.4. persentase rumah tinggal yang menggunakan atap beton, sirap, genteng, seng dan asbes dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami peningkatan mencapai 97,96 persen pada tahun 2021. Persentase rumah tinggal yang menggunakan dinding terluas tembok dan kayu, pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2020

menjadi 99,87 persen. Sedangkan rata-rata luas lantai perkapita pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yaitu menjadi 23,52 meter persegi.

Tabel 7.4. Rumah Tangga Menurut Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 -2021

Indikator Kualitas Perumahan	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Lantai Bukan Tanah (%)	100,00	100,00	100,00
Atap terluas Beton, Genteng, Sirap/kayu/bambu, Seng, dan Asbes (bukan ijuk/rumbia) (%)	98,16	97,62	97,96
Dinding Terluas Tembok, plesteran dan Kayu (%)	99,83	100,00	99,87
Rata-rata Luas Lantai Perkapita (m ²)	21,62	23,02	23,52

Sumber : Diolah dari Susenas 2019-2021, BPS Kab. HSS

7.3 Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal. Yang termasuk dalam kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan

masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Sumber air minum merupakan sumber air yang digunakan untuk keperluan air minum oleh rumah tangga. Berdasarkan jenisnya, sumber air minum dapat dikelompokkan menjadi sumber air minum bersih dan tidak bersih. Sumber air bersih terdiri dari air minum yang bersumber dari air kemasan, air isi ulang, ledeng, sumur bor/pompa dan air dari sumber terlindung dengan jarak ke pembuangan tinja sama atau lebih dari 10 m. Pada tahun 2021 persentase rumah tangga Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menggunakan air minum bersih sebanyak 61,67 persen. Jika dilihat dari daerah tempat tinggal, ada kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan, dimana diperkotaan persentase rumah tangga yang minum air bersih mencapai 72,35 persen, sedangkan di daerah perdesaan hanya sekitar 57,08 persen. Hal ini patut jadi perhatian pemerintah daerah untuk menyediakan program penyediaan air bersih khususnya daerah perdesaan, sehingga akses air minum bersih penduduk desa bisa terpenuhi untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Salah satu indikator perumahan yang berhubungan

dengan sanitasi adalah keberadaan tempat buang air besar (BAB). Indikator ini juga terkait dengan kesadaran masyarakat pada kesehatan. Teknologi tempat buang air besar (BAB) untuk daerah perdesaan berbeda dengan teknologi jamban di daerah perkotaan. Pada tahun 2021, persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri sebesar 79,96 persen. Menurut daerah tempat tinggal pada tahun 2021, persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri di daerah perkotaan sebesar 81,63 persen sedangkan di daerah perdesaan sebesar 79,23 persen. Salah satu yang mendorong makin meningkatnya kepemilikan jamban sendiri adalah Program Jambanisasi yang merupakan salah satu program PNPM Mandiri. Pembangunan jamban untuk membangun sarana pembuangan khususnya jamban bagi rumah tangga yang belum memiliki jamban dan memiliki jamban yang kurang layak. Program bertujuan agar masyarakat memiliki tingkat kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya membuang hajat di jamban serta mendidik masyarakat desa agar mementingkan kesehatan.

Disamping telah memiliki jamban sendiri, penggunaan jamban dengan tangki septik juga merupakan bagian dari kualitas kehidupan bagi rumah tangga dalam memenuhi salah

satu kriteria rumah sehat. Pada tahun 2021 rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tangki septik mencapai 83,07 persen. Menurut daerah tempat tinggal, persentase rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tangki septik di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan tidak berbeda jauh.

Tabel 7.5. Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021

Fasilitas Perumahan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Air Minum Bersih (%)	72,35	57,08	61,67
Jamban Sendiri (%)	81,63	79,23	79,96
TPAT dengan Tangki (%)	81,09	83,92	83,07
Sumber Penerangan Listrik	100,00	100,00	100,00
Sanitasi Layak (%)	81,09	84,58	83,53
Akses Air Minum Layak (%)	76,50	70,52	72,32

Sumber : Diolah dari Susenas 2021, BPS Kab. HSS

Sebagai salah indikator yang digunakan dalam penghitungan untuk tujuan SDGs adalah sanitasi layak. Sebelum tahun 2015, sanitasi layak adalah penggunaan toilet sendiri atau beberapa rumah tangga dengan toilet leher angsa, cemplung/cupluk tertutup dan pembuangan akhir tinja berupa tangki septik/SPAL. Pada tahun 2015-2018, menggunakan konsep yang mengacu pada metadata SDGs yang diterbitkan

pada tahun 2017 dimana rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak apabila rumah tangga memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas), menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau IPAL. Kemudian sejak tahun 2019 konsep yang digunakan mengacu pada metadata SDGs terbaru dimana rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak apabila rumah tangga memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di MCK Komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau IPAL atau bisa juga di lubang tanah jika wilayah tempat tinggalnya di perdesaan. Pada tahun 2021, persentase rumah tangga yang mempunyai sanitasi layak mencapai 83,53 persen.

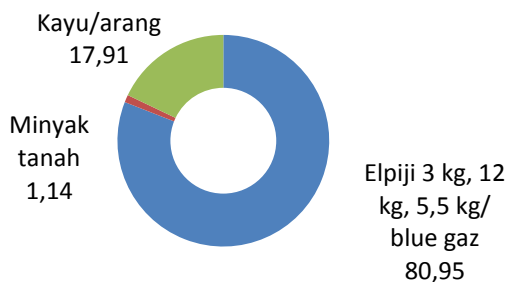
Fasilitas penerangan rumah terdiri dari rumah tangga yang menggunakan listrik (PLN dan non PLN) dan yang menggunakan penerangan selain listrik seperti lampu minyak, obor, dan lain-lain termasuk yang tidak menggunakan penerangan. Persentase rumah tangga yang menggunakan

listrik sebagai sumber penerangan pada tahun 2021 hampir mencapai 100 persen. Antara daerah perkotaan dan perdesaan akses penerangan listrik sudah cukup baik terlihat pada fasilitas penerangan, dimana pada tahun 2021 persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan pada daerah perkotaan dan perdesaan hampir mencapai 100 persen.

Sebelum tahun 2011, air minum layak adalah sumber air untuk minum berupa air leding eceran/meteran, air hujan, dan pompa/sumur terlindung/mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat ≥ 10 m. Kemudian sebelum tahun 2019, air minum layak adalah sumber air untuk minum, mandi, dan keperluan sehari-hari yang meliputi air leding eceran/meteran, air hujan, dan pompa/sumur terlindung/mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat ≥ 10 m. Mulai tahun 2019 kembali mengalami perubahan definisi, konsep yang digunakan mengacu pada metadata SDGs di mana rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak (*access to improved water*) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan

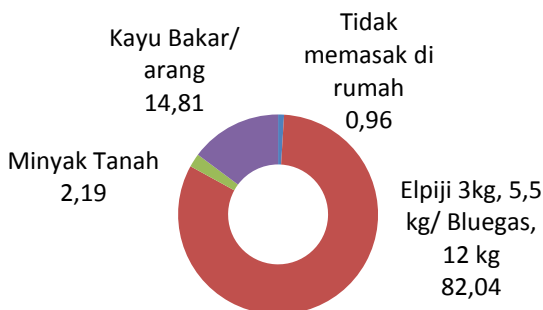
mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Perbedaan klasifikasi dari sebelumnya adalah tidak lagi memasukan karakteristik ke tempat pembuangan limbah/kotoran/ tinja terdekat. Berdasarkan data Susenas 2021 persentase rumah yang mempunyai akses air minum layak mencapai 72,32 persen. Jika dilihat dari daerah tempat tinggal, persentase rumah tangga yang mempunyai akses air minum layak di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan, yaitu masing-masing sebesar 76,50 persen dan 70,52 persen.

Grafik 7.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Bahan Bakar Memasak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021



Sumber : Diolah dari Susenas 2021, BPS Kab. HSS

Grafik 7.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Bahan Bakar Memasak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020



Sumber : Diolah dari Susenas 2020, BPS Kab. HSS

Ditinjau dari bahan bakar utama untuk memasak, sebagian besar rumah tangga telah menggunakan gas/elpiji (80,95 persen) sebagai sumber energi utama untuk memasak. Selain itu masih terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan rumah tangga yang menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar utama memasak (17,91 persen). Jika dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2020), penggunaan bahan bakar elpiji untuk memasak masih menjadi bahan bakar utama penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk memasak.

Terkait dengan indikator *SDGs (Sustainable Development Goals)* mengenai Salah satu Goal SDG's adalah energi bersih dan terjangkau (*affordable and clean energy*) yaitu *Goal 7*. Target *Goal 7* yang merupakan agenda 2030

meliputi tercapainya akses universal pada energi, terjangkau dan handal; peningkatan pemanfaatan energi terbarukan; menggandakan energi efisiensi; mendukung pembangunan infrastruktur energi dan teknologi untuk penyediaan akses energi berkelanjutan. Potensi energi terbarukan seperti biomasa, panas bumi, energi surya, energi air, dan energi angin cukup besar. Jenis sumber energi terbarukan (*renewable energy*) yang dimiliki Indonesia cukup banyak. Jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik diyakini dapat menggantikan energi fosil. Terkait kebutuhan bahan bakar biomassa WHO mendefinisikan biomassa sebagai bahan bakar yang berasal dari hewan atau tumbuhan, sementara Kementerian Pertambangan dan Energi mendefinisikan biomassa adalah kayu bakar, arang, batu bara, sekam, batang padi, tandan kelapa dan tempurung kelapa (Laporan MDGs, Februari 2004). Pemerintah perlu menyiapkan strategi dalam hal memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kelestarian lingkungan hidup bagi manusia, sehingga masyarakat secara perlahan dapat meninggalkan kayu bakar sebagai energi utama untuk memasak. Selain itu beberapa penelitian menunjukkan bahwa dampak pembakaran bahan bakar padat sangat berbahaya bagi kesehatan karena

memudahkan manusia terkena infeksi pernapasan. Bahaya dimungkinkan karena rumah di Indonesia rata-rata dirancang tanpa cerobong asap guna saluran pembuangan asap dan umumnya ventilasi dapur hanya berupa satu lubang di langit-langit atau dinding dapur.

7.4 Teknologi Informasi dan Komunikasi

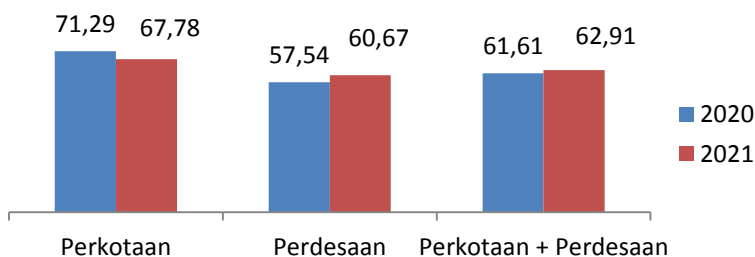
Teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi, mencakup segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan, teknologi komunikasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Istilah TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) ada setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer (perangkat keras ataupun lunak) dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Perpaduan teknologi tersebut berkembang sangat pesat melampaui bidang teknologi lainnya. Sampai awal abad ke-21, TIK masih terus mengalami berbagai perubahan dan belum terlihat titik jenuhnya.

Ditinjau dari fasilitas informasi dan komunikasi (TIK) yang di akses penduduk usia 5 tahun keatas. Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang memiliki/menguasai telepon seluler (HP) dalam tiga bulan terakhir di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 sebesar 62,91 persen. Jika dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2020), persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang memiliki/menguasai telepon seluler (HP) dalam tiga bulan terakhir mengalami peningkatan pada tahun 2021. Jadi lebih dari separuh penduduk usia 5 tahun ke atas kabupaten Hulu Sungai Selatan menguasai/memiliki telepon seluler (HP). penduduk usia 5 tahun keatas yang menggunakan telepon seluler mencapai 85,50 persen pada tahun 2021. Jika Hal ini menunjukkan bahwa memiliki handphone sekarang sudah seperti kebutuhan primer, pasalnya tiap orang hampir memilikinya dan menggunakannya dari berbagai merk yang terkenal mahal maupun yang murah yakni buatan cina maupun merk lainnya.

Selain kepemilikan telepon seluler (HP), data Susenas tahun 2021 menunjukkan Penduduk usia 5 tahun keatas yang menggunakan telepon seluler mencapai 85,50 persen pada tahun 2021. Jika dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2020) mengalami peningkatan persentase. Hal ini menunjukkan

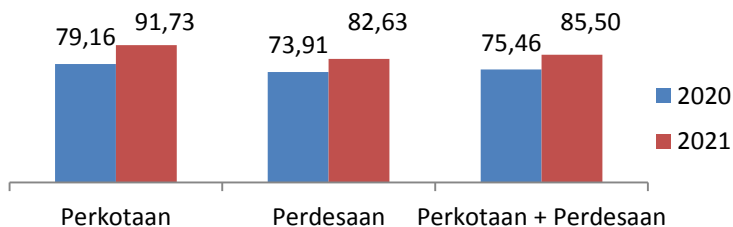
menggunakan HP sudah menjadi kebiasaan rutin bagi penduduk. Ibaratnya ada istilah lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP (telepon seluler). Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi HP dari berbagai merk yang terkenal mahal maupun yang murah yakni buatan cina maupun merk lainnya sudah banyak dipasaran.

Grafik 7.3. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke atas yang Menguasai/Memiliki Telepon Seluler (HP) dalam Tiga Bulan Terakhir di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2021



Sumber : Diolah dari Susenas 2020-2021, BPS Kab. HSS

Grafik 7.4. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP) dalam Tiga Bulan Terakhir di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2021

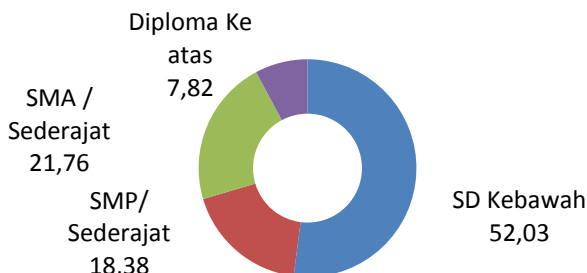


Sumber : Diolah dari Susenas 2020-2021, BPS Kab. HSS

Pada Grafik 7.3 penduduk usia 5 tahun ke atas yang memiliki telepon seluler (HP) tahun 2021 daerah perkotaan persentasenya lebih besar dari daerah pedesaan yaitu masing-masing 67,78 persen dan 60,67 persen. Tetapi baik daerah perkotaan dan pedesaan lebih dari 50 persen penduduk usia 5 tahun ke atas sudah memiliki telepon seluler (HP). Selain itu dari sisi penggunaan telepon seluler persentase penduduk usia 5 tahun sudah sangat tinggi baik daerah perkotaan dan pedesaan masing-masing diatas 80 persen bahkan daerah perkotaan lebih dari 90 persen pada tahun 2021.

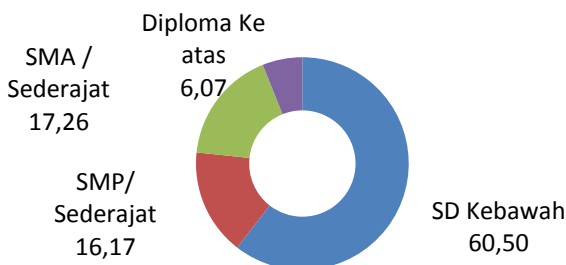
Dilihat dari tingkat pendidikan, persentase terbesar penduduk usia 5 tahun ke atas yang memiliki telepon seluler (hp) dan yang menggunakan telepon seluler (hp) dalam tiga bulan terakhir pada tahun 2021 adalah yang berpendidikan SD kebawah yaitu masing-masing sebesar 52,03 persen dan 60,50 persen. Semakin mudahnya pengoperasian aplikasi di HP (telepon seluler) saat ini sehingga penggunaan bisa menjangkau penduduk untuk semua jenjang pendidikan Dari Semakin pesatnya kemajuan telepon seluler yang telah dilengkapi fitur-fitur untuk kamera, games, penjelajahan di dunia maya dan lain-lain, menjadi alasan masyarakat lebih memilih telepon seluler (HP) sebagai alat komunikasi.

Grafik 7.5. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke atas yang Menguasai/Memiliki Telepon Seluler (HP) dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021



Sumber : Diolah dari Susenas 2020, BPS Kab. HSS

Grafik 7.6. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP) dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021

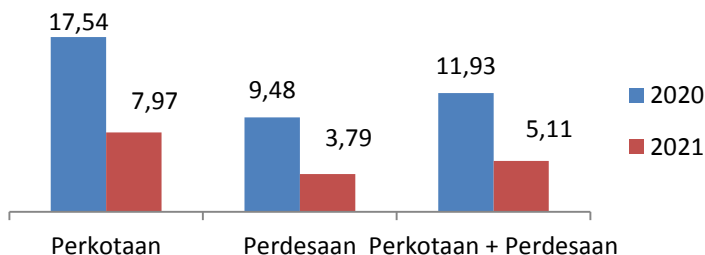


Sumber : Diolah dari Susenas 2021, BPS Kab. HSS

Komputer memiliki kemampuan untuk menyimpan dan memproses sejumlah informasi dan menampilkan kalkulasi melalui mesin pengolah data. Fungsi utama komputer

adalah komputasi, penyimpanan informasi, komunikasi dan pengawasan. Manfaat komputer diantaranya sebagai sarana komunikasi, memudahkan pekerjaan, penunjang pendidikan (media pembelajaran), berbisnis dan media hiburan.

Grafik 7.7. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke atas yang Menggunakan Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet) dalam Tiga Bulan Terakhir Menurut Klasifikasi Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2021

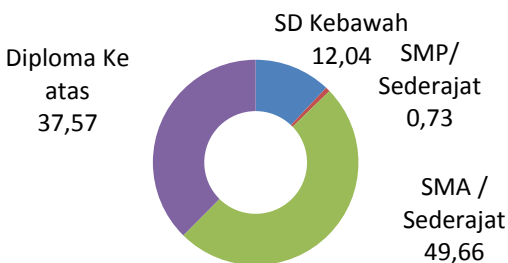


Sumber : Diolah dari Susenas 2020-2021, BPS Kab. HSS

Pada tahun 2021, Persentase penduduk usia 5 tahun yang menggunakan komputer (PC/dekstop, laptop/notebook, tablet) dalam tiga bulan terakhir sebesar 5,11 persen dari total penduduk usia 5 tahun ke atas Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 (11,93 persen). Penurunan ini diantaranya disebabkan pada masa pandemi covid 19 tahun 2021 hampir semua sekolah pembelajarannya tidak tatap muka (SD, SLTP dan SLTA), untuk tugas biasanya tugas dikirim melalui HP (telepon

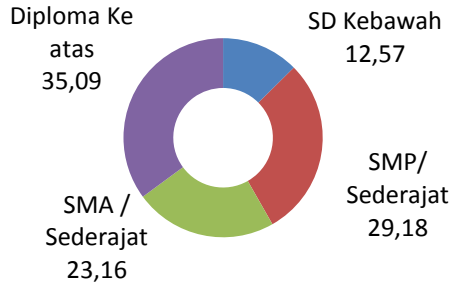
seluler) dan dikerjakan tanpa menggunakan komputer. Untuk pelajar pada umumnya biasanya menggunakan komputer pada saat praktek disekolah. Sesuai grafik 7.6 dan grafik 7.7 bahwa persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan komputer yang jenjang pendidikannya SD dan SLTP pada tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2020). Selain itu dilihat dari tingkat pendidikannya, persentase penduduk 5 tahun ke atas pada tahun 2021 yang menggunakan komputer sebagian besar berpendidikan SMA/Sederajat (49,66 persen) dan Diploma keatas (37,57 persen). Hal ini menunjukkan penduduk yang berpendidikan tinggi sebagian besar menggunakan komputer untuk menunjang pengetahuannya ataupun pekerjaannya.

Grafik 7.8. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke atas yang Menggunakan Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet) dalam Tiga Bulan Terakhir Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021



Sumber : Diolah dari Susenas 2021, BPS Kab. HSS

Grafik 7.9. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke atas yang Menggunakan Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet) dalam Tiga Bulan Terakhir Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020



Sumber : Diolah dari Susenas 2020, BPS Kab. HSS

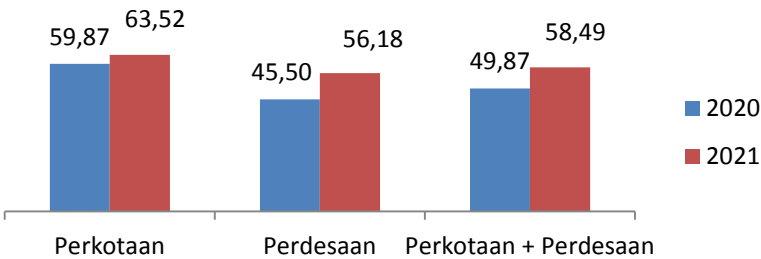
Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah *Transmission Control Protocol* atau *Internet Protocol Suite* (disingkat sebagai istilah TCP/IP). TCP/IP ini merupakan protokol pertukaran paket (dalam istilah asingnya *Switching Communication Protocol*) yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Internet memudahkan manusia dalam memperoleh informasi di seluruh dunia. Penggunaan internet seiring berjalanya waktu semakin tinggi, termasuk di Indonesia. Pengguna internet di Indonesia

setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Jaringan internet digunakan untuk mencari informasi, berkomunikasi, mencari berita, transaksi jual beli, dan sebagai sarana mencari hiburan. Salah satu contoh penggunaan internet seperti membuka situs-situs di google untuk mencari informasi, mengakses youtube, mengakses media sosial seperti facebook, instagram, whatsapp, twitter dan lain-lain.

Berdasarkan Grafik 7.10 pada tahun 2021 penduduk usia 5 tahun ke atas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir sebelum pendataan hampir mencapai separuh penduduk usia 5 tahun ke atas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (58,49 persen). Jika dibandingkan tahun 2020 mengalami peningkatan kisaran 8,62 persen. Hal ini menunjukkan bahwa internet sudah tidak asing lagi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahkan banyak masyarakat yang rela mengeluarkan biaya untuk beli kouta internet maupun memasang wifi di rumah atau tempat kerja. Ditinjau dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, persentase terbesar penduduk usia 5 tahun ke atas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mengakses internet pada tahun 2021 adalah yang tingkat pendidikan tertingginya adalah SD kebawah sebesar 51,33 persen. Hal ini menunjukkan

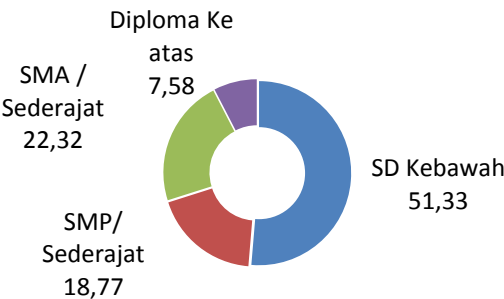
bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet tidak terbatas untuk penduduk yang berpendidikan tinggi saja karena kemudahan dalam aksesnya.

Grafik 7.10. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke atas yang Mengakses Internet dalam Tiga Bulan Terakhir Menurut Klasifikasi Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2021



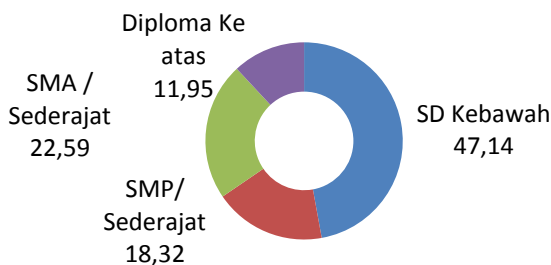
Sumber : Diolah dari Susenas 2020-2021, BPS Kab. HSS

Grafik 7.11. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021



Sumber : Diolah dari Susenas 2021, BPS Kab. HSS

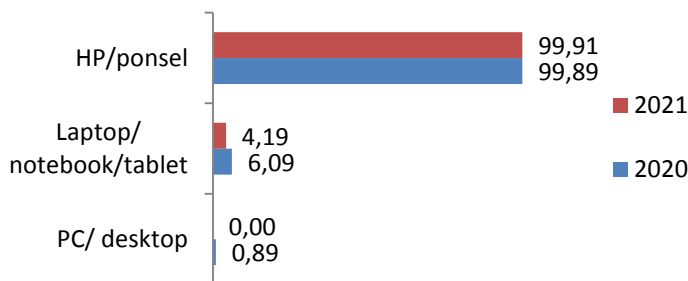
Grafik 7.12. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020



Sumber : Diolah dari Susenas 2020, BPS Kab. HSS

Pada Grafik 7.13. menunjukkan pada tahun 2021 (99,91 persen), hampir 100 persen penduduk usia 5 tahun ke atas Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir menggunakan media HP/ ponsel. Contoh HP/Ponsel yang sering digunakan untuk mengakses internet yaitu smartphone menjadi media favorite bagi kalangan masyarakat untuk berselancar di dunia maya dengan kemudahan dan kelengkapan aplikasinya. Masifnya penggunaan smartphone rupanya membuat koneksi internet dengan komputer atau dekstop jadi lebih rendah. Karena menggunakan *smartphone*, para pengguna internet lebih sering terhubung melalui paket kuota seluler. Sementara, tak terlalu banyak yang terhubung lewat koneksi *fixed cable* di rumah.

Grafik 7.13. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Media yang Digunakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2021

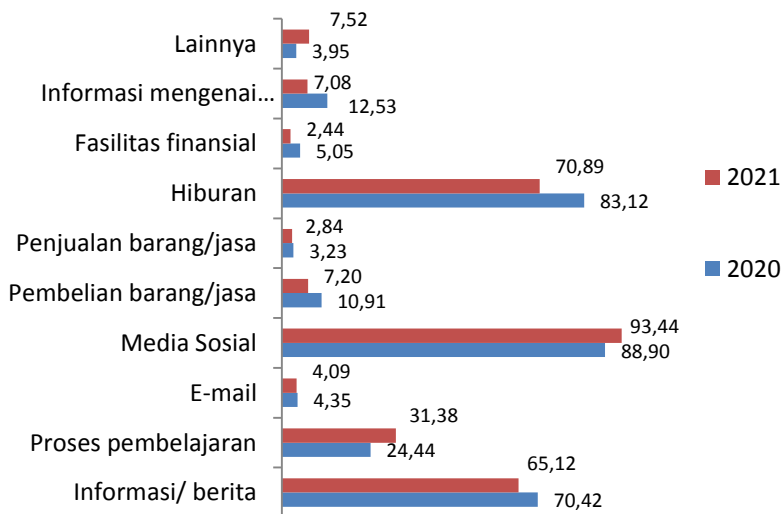


Sumber : Diolah dari Susenas 2020-2021, BPS Kab. HSS

Makin ke sini, televisi sudah semakin ditinggalkan penontonnya, khususnya dari kalangan milenial. Ditinggalkannya televisi tentu tak lepas dari kehadiran internet. Anak muda zaman sekarang sering menghabiskan waktu lebih lama saat berjelajah di internet dibandingkan duduk di depan televisi. Fakta tersebut memang tidak bisa dihindari, beberapa alasan kenapa anak muda lebih memilih main internet daripada menonton televisi diantaranya memiliki sumber informasi yang lengkap, mencari informasi sesuai dengan yang diinginkan, pilihan entertainment yang jauh lebih bervariasi dan bisa update kehidupan lewat sosial media. Pada Grafik 7.14. pada tahun 2021 menurut hasil pendataan SUSENAS 2021 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam

3 bulan terakhir tujuan penggunaan internet yang persentasenya terbesar adalah untuk media sosial (93,44 persen), hiburan (70,89 persen), dan informasi/berita (65,12 persen). Demikian juga dengan tahun sebelumnya (tahun 2020) untuk tujuan penggunaan internet tidak berbeda jauh dengan tahun 2021.

Grafik 7.14 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Tujuan Penggunaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2021



Sumber : Diolah dari Susenas 2020-2021, BPS Kab. HSS

BAB VIII

KESIMPULAN

1. Kecamatan Kandangan merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Kesadaran masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai usia ideal untuk melakukan perkawinan pertama usia di atas 20 tahun masih rendah.
3. Angka kesakitan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020.
4. Lebih dari separuh penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berobat jalan pergi ke praktek dokter/bidan/perawat pada tahun 2021.
5. Hampir semua wanita pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir pada tahun 2021 mendapatkan pertolongan persalinan dari tenaga paramedis.
6. Rata-rata penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenyam pendidikan hanya sampai tingkat SD.

7. Angkatan kerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD kebawah.
8. Pada tahun 2021 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tertinggi pada tingkat pendidikan SLTA keatas.
9. Sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan
10. Persentase penduduk miskin Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun 2020.
11. Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021 menempati rumah sendiri.
12. Lebih dari separuh penduduk usia 5 tahun ke atas Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021 menggunakan telepon seluler (HP) dan mengakses internet.



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**
Jl. Ahmad Yani No. 14 Kandangan, 71214
Telp. : (0517) 21372 Fax. : (0517) 21374